

RENSTRA

2016-2021

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkenaan dengan telah disusunnya Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 merupakan produk perencanaan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian yang menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan publik bagi Sekretariat, 4 (empat) Bidang Teknis, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 berfungsi untuk menjawab pertanyaan menyangkut :

1. Kemana arah pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang;
2. Bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau mencapainya;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Sedangkan secara spesifik, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019 memiliki fungsi:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang realistis, konsisten dengan visi, misi, dan tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam implementasinya;
2. Menterjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait perkembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau;
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau;
5. Menyediakan dasar (*Benchmark*) untuk mengukur sejauhmana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan;
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dilakukan melalui beberapa

tahapan dan tata cara penyusunan Renstra, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari :

1. Tahap Persiapan, yaitu :

- a) Pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
- b) Orientasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
- c) Penyusunan rencana kerja penyiapan dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, meliputi :

- a) Pengumpulan data/informasi kondisi pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau;
- b) Penyusunan profil pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dan prediksi jangka menengah;
- c) Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau;
- d) Perumusan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau;
- e) Evaluasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
- f) *Review* Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau;
- g) Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan;
- h) Perumusan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- i) Pembahasan forum SKPD;
- j) Berita acara hasil kesepakatan forum SKPD;

- k) Penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, meliputi :

- a) Penyusunan rancangan akhir dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
- b) Penyusunan naskah akademis rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

4. Tahap Penetapan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka diamanatkan bahwa Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. Di samping itu, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019, serta Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019.

Operasionalisasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 yang dituangkan ke dalam berbagai program prioritas dan target kinerja tahunan,

selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,

- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
30. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan visi, misi Gubernur Tahun 2016-2021. Selain itu juga disusunnya Renstra untuk dijadikan sebagai alat kontrol bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dan memberikan pedoman pembangunan lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan dalam periode Renstra sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan RKA/DPA setiaptahunnya melalui penetapan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

1.4. Sistematikan Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja Pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Merumuskan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Telaahan terhadap visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-2021, juga menentukan Penentuan isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN, SASARAAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menjelaskan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau serta Strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisikan uraian mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan hingga 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU YANG MENGACU PADA TUJUJNDAN SASARAN RPJMD

Berisi rumusan indikator kinerja tujuan maupun sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau yang berkontribusi/ mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

BAB VIII : PENUTUP

Memuat rangkuman dan kesimpulan dari seluruh substansi yang dimuat di dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi di daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan program di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pembinaan hubungan industrial;
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
- f. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang transmigrasi;
- g. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- i. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial;
- c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- e. Bidang Transmigrasi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

a) Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif di lingkungan Dinas, perencanaan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan laporan serta evaluasi;
- b. Pengelolaan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan;
- e. Pengelolaan keuangan;
- f. Fasilitasi dan mengkoordinasikan dalam pelayanan bidang; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh kepala dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan pekerjaan dan kegiatan penyusunan

rencana program dan kegiatan, pendataan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan program bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan dinas;
 - b. Membuat laporan bidang secara berkala maupun tahunan; dan
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh sekretaris.
- b. Sub Bagian Keuangan;
- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, penyusunan rencana anggaran rutin/pembangunan serta pengelolaan anggaran rutin pembangunan.

Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan mengelola anggaran pembangunan dan rutin;
- b. Menyusun gaji dan tunjangan pegawai;
- b. Menerima permohonan pembayaran dari pihak ketiga;
- c. Monitoring pelaksanaan/penyerapan anggaran pembangunan dan rutin;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan anggaran Dinas; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, penyusunan rencana anggaran rutin/pembangunan serta pengelolaan anggaran rutin pembangunan.

Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan mengelola anggaran pembangunan dan rutin;
- b. Menyusun gaji dan tunjangan pegawai;
- f. Menerima permohonan pembayaran dari pihak ketiga;
- g. Monitoring pelaksanaan/penyerapan anggaran pembangunan dan rutin;
- h. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan anggaran Dinas; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

b) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, serta jaminan sosial pengupahan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis pelaksanaan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan;

- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis pelaksanaan jaminan sosial pengupahan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial terdiri dari:

- a. Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial;

Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, petunjuk teknis pembinaan kelembagaan serta penyelenggaraan pendidikan Hubungan Industrial dan penanganan penyelesaian perselisihan yang meliputi perselisihan hak, perselisihan PHK, perselisihan kepentingan maupun perselisihan antar serikat/buruh dalam suatu perusahaan dan merumuskan kebijakan teknis, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial;

Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pemasarakatan hubungan industrial;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kelembagaan dan pemasarakatan hubungan industrial;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perjanjian kerja;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Instansi terkait/Organisasi pekerja dan pengusaha, baik

- Kepolisian dan Pengadilan Hubungan Industrial dalam pencegahan perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
 - g. Pembinaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- b. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial; dan Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan teknis di bidang syarat kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama Pengupahan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota/Sektoral dan jaminan sosial.

Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- e. Melakukan pembinaan dan Pengesahan serta Pencatatan Peraturan Perusahaan dan Investasi Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian kerja bersama;
- f. Melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Layak; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan tenaga kerja;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- d. Melaksanakan perjanjian kerja, pengupahan;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diserahkan oleh kepala bidang.

c) Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerjaterdiri dari:

- a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas pokok melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja serta pemberian sertifikasi di bidang tenaga kerja.
Uraian tugas adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun program kerja;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah perumusan kebijakan dan pembinaan teknis pelatihan dan pengembangan produktivitas;
 - c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi Pelatihan dan pengembangan produktivitas;
 - d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan standarisasi, sertifikasi dan pemagangan tenaga kerja;
 - e. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh kepala bidang.

- b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan teknis di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Uraian tugas sebagai berikut;

- a. Menyusun program kerja;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- c. Memproses izin pendirian kantor cabang PPTKIS di daerah;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan dan penggunaan tenaga kerja;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

- c. Seksi Data, Informasi Pasar Kerja dan Kerjasama.

Seksi Data, Informasi Pasar Kerja dan Kerjasama mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan teknis di bidang data, informasi pasar kerja dan kerjasama.

Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja;

- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan, informasi pasar kerja dan kerjasama;
- c. Menghimpun dan menganalisis data informasi pasar kerja mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan;
- d. Menyusun metode dan pedoman teknis analisis jabatan perangkat penyuluhan dan bimbingan jabatan serta melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
- e. Menyusun pedoman system komputerisasi informasi pasar kerja/bursa kerja untuk penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
- f. Memproses perijinan lembaga bursa kerja khusus dan lembaga penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

d) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan pelayanan, monitoring, evaluasi, pelaporan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
- b. Penyiapan bahan pelayanan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
- d. Penyiapan bahan pelaporan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;

- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan;
- f. Melaksanakan koordinasi di bidang pengawasan ketenagakerjaan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak;
Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelayanan, monitoring, evaluasi, pelaporan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak.

Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak;
- b. Penyusunan bahan pelayanan di bidang Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak;
- c. Penyusunan bahan evaluasi di bidang Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak;
- d. Penyusunan bahan pelaporan di bidang Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak;
- e. Monitoring, evaluasi, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

- b. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyiapan pelaksanaan pelayanan, monitoring, evaluasi, pelaporan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Menyiapkan bahan pelayanan di bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c. Menyiapkan bahan pelaporan di bidang Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dibidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

- c. Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.

Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyiapan pelaksanaan pelayanan, monitoring, evaluasi, pelaporan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.

Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;

- b. Penyiapan bahan pelayanan di bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi di bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
- d. Penyiapan bahan pelaporan di bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
- e. Monitoring, evaluasi, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dibidang pembinaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

e) Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan Penyiapan Pemukiman, Penempatan, Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan teknis penyiapan pemukiman penempatan, fasilitas perpindahan, pengembangan masyarakat dan kawasan, peningkatan kapasitas SDM masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana dan prasarana kawasan, promosi, investasi, kemitraan dan penyerasian lingkungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan perencanaan teknis penyiapan permukiman, penempatan, fasilitas perpindahan, pengembangan masyarakat dan kawasan, peningkatan kapasitas SDM masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana dan prasarana kawasan, promosi, investasi, kemitraan dan penyerasian lingkungan;
- c. Penyusunan standar, Norma, pedoman, kriteria dan prosedur penyiapan pemukiman, penempatan, fasilitas perpindahan,

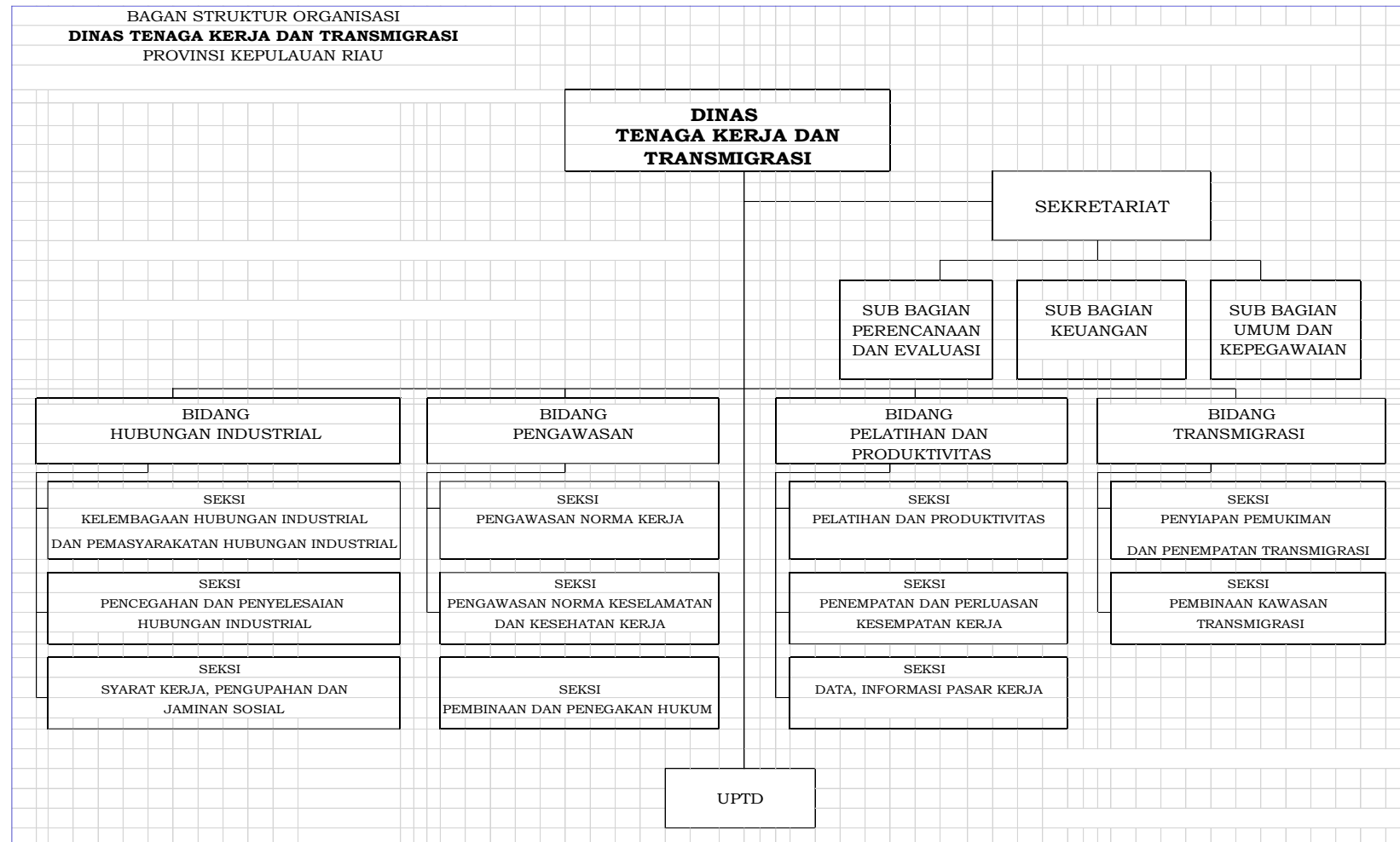
- pengembangan masyarakat dan kawasan, peningkatan kapasitas SDM masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana dan prasarana kawasan, promosi, investasi, kemitraan dan penyerasian lingkungan;
- d. Menyelenggarakan bimbingan teknis pembinaan evaluasi penyiapan pemukiman, penempatan, fasilitas perpindahan, pengembangan masyarakat dan kawasan, peningkatan kapasitas SDM masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana dan prasarana kawasan, promosi, investasi, kemitraan dan penyerasian lingkungan;
 - e. Mewujudkan penataan dan penyebaran penduduk sesuai dengan konsep kebijaksanaan teknis operasional penyelenggaraan transmigrasi dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat tempatan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Transmigrasi terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi; dan
Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun program kerja;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi;

- c. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi;
 - d. Melaksanakan Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi;
 - e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi;
 - g. Melaksanakan survey, pendataan dan monitoring; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- b. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- Uraian tugas adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - c. Melaksanakan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

2.1.1. STRUKTUR ORGANISASI



2.2. Sumber daya Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di dukung oleh sumber daya yang ada baik personil (SDM) maupun dilengkapi sarana dan prasarana yang relative memadai, adapun personil (SDM) yang ada dapat dilihat sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai / Personil (SDM)

Hingga 31 Desember 2015, pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 70 orang, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau
Kondisi Hingga Bulan Desember 2015
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1	Laki-Laki	49	70
2	Perempuan	21	30
	Jumlah	70	100,00

Tabel 2.2
PNS Berdasarkan Eselonering dan Staf

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	II.a	1	Kepala Dinas
2	III.a	6	Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang
3	IV.a	16	Kasubag/Kasi
4	Staf PNS	38	Dinas dan UPT
5	Fungsional	5	Dinas dan UPT
6	Staf Pegawai Tidak Tetap (PTT)	4	Dinas dan UPT
	Jumlah	70	

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau
Kondisi Hingga Bulan Desember 2015 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	%
1	Doktoral (S3)	-	
2	Pasca Sarjana (S2)	7	10,00
3	Sarjana (S1)	44	62,86
4	Sarjana Muda/Diploma 3	7	10,00
5	SLTA/ Sederajat	12	17,14
6	SLTP/Sederajat	-	
7	SD/Sederajat	-	
	Jumlah	70	100,00

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi terbanyak adalah pegawai berpendidikan S1 yaitu sebesar 62,86% dari seluruh pegawai. Dengan demikian, apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah ini dianggap telah cukup memadai diperbandingkan dengan jenis pekerjaan yang ada. Untuk meningkatkan kualitas SDM, saat ini beberapa pegawai yang berasal dari Diploma maupun SMA tengah melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Demikian juga halnya dengan pegawai berpendidikan S1, beberapa diantaranya tengah melanjutkan pendidikan S2, baik atas biaya sendiri maupun beasiswa dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuka kesempatan yang lebih luas melalui program beasiswa pegawai.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau
Kondisi Hingga Bulan Desember 2015 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	IV	7	10,00
2	III	55	78,58
3	II	4	5,71
4	I	-	
5	Non Golongan	4	5,71
	Jumlah	70	100,00

Dilihat berdasarkan golongan kepangkatannya, pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau terbanyak berada pada golongan III, yaitu mencapai 78,58% dari seluruh pegawai yang ada. Demikian pula halnya dengan golongan IV yang mencapai 10,00% dari seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, dari segi golongan kepangkatan, jumlahnya dianggap telah cukup memadai dan sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan. Namun demikian, masih perlu dilakukan pembinaan yang bersifat pengembangan kapasitas khususnya bagi pegawai yang memiliki golongan, kepangkatan tinggi dalam rangka peningkatan

mutu/kualitas pegawai pada golongan kepangkatan tersebut, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 2.5
PNS Berdasarkan Penugasan

NO	TEMPAT TUGAS	JUMLAH (ORANG)
1	Sekretariat	16
2	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial	11
3	Bidang Pelatihan dan Penempatan	9
4	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaa	10
5	Bidang Transmigrasi	5
6	Bidang UPT	19
7	Fungsional	-
	Jumlah	70

Dilihat berdasarkan komposisi pegawai per unit kerja, dari 70 pegawai di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 19 orang atau 27,14% diantaranya berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hal ini dikarenakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau UPT BLK yang menjadi ujung tombak pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Disamping jumlah dan kualitas personil, untuk mendukung / menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperlukan adanya sarana dan prasarana kerja yang terdiri dari barang tidak bergerak dan barang bergerak

2.2.2.1. Barang Tidak Bergerak yaitu :

**Tabel 2.6
Barang Tidak Bergerak**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Status Tanah
			Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung Kantor Permenan	Baik	Tidak	Beton	Tanah Milik Pemda
2	Bangunan Gedung Kantor Permenan	Baik	Tidak	Beton	Tanah Milik Pemda
3	Bangunan Gedung Kantor Permenan	Baik	Tidak	Beton	Tanah Milik Pemda
4	Bangunan Gudang Tertutup Permenan	Baik		Beton	Tanah Milik Pemda
5	Bangunan Bengkel Permenan	Baik	Tidak	Beton	Tanah Milik Pemda
6	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	Baik	Tidak	Tidak	Tanah Milik Pemda
7	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	Tanah Milik Pemda
8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permenan	Baik		Beton	Tanah Milik Pemda
9	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permenan	Baik		Beton	Tanah Milik Pemda
10	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permenan	Baik		Beton	Tanah Milik Pemda
11	Gedung Pos Jaga Permenan	Baik	Tidak	Beton	Tanah Milik Pemda
12	Konstruksi Pagar	Baik	Tidak	Beton	Tanah Milik Pemda
13	Asrama Permenan	Baik	Tidak	Beton	Tanah Milik Pemda
14	Lain-lain	Baik		Tidak	Tanah Milik Pemda
15	Lain-lain	Baik		Beton	Tanah Milik Pemda
16	Lain-lain	Baik		Beton	Tanah Milik Pemda
17	Lain-lain	Baik		Beton	Tanah Milik Pemda
18	Lain-lain	Baik		Beton	Tanah Milik Pemda

19	Lain-lain	Baik	Beton	Tanah Milik Pemda
----	-----------	------	-------	-------------------

2.2.2.2. Barang Bergerak yaitu :

Barang bergerak terdiri dari alat angkutan, peralatan/perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, alat studio, alat pengolahan data dan alat-alat komunikasi yang terdiri dari :

**Tabel 2.7
Barang Bergerak**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah
1	3	4	5
1	Pompa Lain-lain	-	2
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota avanza	2
3	Sepeda Motor	Suzuki thander	8
4	Gerobak Dorong	Sakai	4
5	Alat Angkut Apung Motor Brg Lain-lain	-	1
6	Mesin Gerinda	-	9
7	Mesin Las Listrik	WIM / 30-130 Amp	18
8	Mesin Bor Tangan	-	
9	Auto Lift	-	3
10	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	-	6
11	Peralatan Las Listrik	-	13
12	Peralatan Las Karbit	-	5
13	Peralatan Las Lain-lain	Wim	2
14	Bak Air	-	1
15	Perkakas Pemetong Plat	-	2
16	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lain-lain	-	2
17	Perkakas Pengangkat Lain-lain	-	2
18	Tool Kit Set	Krisbow	5
19	Tool Kit Boks	-	8
20	Tool Cabinet Set	-	3
21	Cermin Besar (200 x 75 cn)	-	9
22	CRT Tester	-	2
23	Universal Tester Lain-lain	-	2
24	Tool Set	-	2

25	Garpu Besi	-	3
26	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	tanaka	1
27	Rak-rak Penyimpanan	-	4
28	Mesin Listrik Standar	Jiangdong	4
29	Lemari Besi	-	28
30	Filling Besi/Metal	-	47
31	Lemari Kaca	-	8
32	Alat Penghancur Kertas	-	1
33	White Board	-	2
34	White Board	-	7
35	Alat Pemotong Kertas	-	1
36	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	-	3
37	Lemari Kayu	-	1
38	Rak Kayu	-	1
39	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	-	19
40	Meja Rapat	-	1
41	Meja Tulis	-	10
42	Meja Makan	-	3
43	Meja Tambahan	-	3
44	Kursi Rapat	-	5
45	Kursi Tamu	-	1
46	Kursi Biasa	-	10
47	Kursi Lipat	Futura	96
48	Meja Komputer	-	15
49	Meja Komputer	-	10
50	Kasur	-	18
51	Bantal	-	28
52	Seprei	-	51
53	Meja Biro	-	103
54	Sofa	-	6
55	Lemari Pakaian	-	19
56	Gordyn	-	1
57	Karpet	POLYPROPYLEN E	1
58	Jam Mekanis	-	13
59	Jam Elektronik	-	1
60	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	-	2
61	Mesin Potong Rumput	-	3
62	Alat Pembersih Lain-lain	KRISBOW	1
63	Lemari Es	-	3
64	AC Split	sanyo	48
65	Kipas Angin	-	19

66	Kompor Gas	-	2
67	Alat Dapur Lainnya	-	38
68	Rak Piring	-	2
69	Alat Pemanas	-	1
70	Televisi	-	2
71	Cassette Recorder	-	1
72	Loudspeaker	UBL	2
73	Sound System	TOA	1
74	Microphone	-	5
75	Microphone Table Stand	-	2
76	Tustel	-	6
77	Mesin Jahit	-	30
78	Alat Hiasan	MOTIF SERAT KAYU	1
79	Tangga Aluminium	HOME LITE	4
80	Dispenser	-	14
81	Mimbar/Podium	-	2
82	Handy Cam	Sony	3
83	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	4
84	Tripot Speaker	-	2
85	Rak Sepatu	-	5
86	Alat Pemadam Portable	-	5
87	P.C Unit/ Komputer PC	-	37
88	Lap Top	acer	32
89	Printer	epson LQ	44
90	Scanner	-	3
91	UPS	ICA	2
92	DVD-Rom Drive	PIONEER	1
93	Memory	-	1
94	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	3
95	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	oerbitren	
96	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	10
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	2
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	1
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	15
100	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	75
101	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	-	85
102	Buffet Kayu	-	2
103	Proyektor + Attachment	-	9
104	Microphone/Wireless Mic	-	3
105	Stand Microphone	-	1
106	Amplifier	YAMAHA	2
107	Megaphone	-	1

108	Facsimile	-	2
109	Wireless Amplifier	-	1
110	Antena SHF/Parabola Portable	-	1
111	Sendok Cetak	-	29
112	Grac Cataract Knipe	-	7
113	Dial Gauge LC:13	-	1
114	Mixer	YAMAHA	1
115	TIG Welding/Machine	WIM	4
116	Cutting Machine	-	1
117	Mangkok Porselin	-	3
118	Gelas minum	-	28
119	Thermo Analyzer	-	2
120	Digital LCR Meter	-	2
121	Multi Tester	-	1
122	Eart Tester	KRISBOW	2

2.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau yaitu melaksanakan urusan pemerintah provinsi dibidang tenaga kerja dan transmigrasi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga melaksanakan fungsinya yaitu salahsatunya Pelaksanaan tugas dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi, serta penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci pencapaian kinerja indikator urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2010-2015

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Kinerja Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian					Capaian s/d Tahun 2015
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1)	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,95	65	66	67	69	70	70	68,14	69,33	70,53	65,95	65,07	65,07
2)	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	Kasus	72	70	60	60	55	50	50	29	52	36	81	48	48
3)	Persentase Jumlah Angkatan Kerja Dibandingkan Jumlah Penduduk	%	91,89	92	92,4	93	94	95	95	41,97	40,10	41,76	42,62	49,08	49,08
4)	Tingkat Pengangguran % Dari Angkatan Kerja	%	6,9	6,5	6,25	5,75	5,25	4	4	7,8	4,93	5,63	6,69	6,20	6,20
5)	Permintaan Tenaga Kerja	Orang	5646	6000	6500	7000	9000	1000	10000	3764 0	3704 7	4384 0	3420 3	268.2 98	268.298
6)	Persentase Penduduk Yang Bekerja Dibandingkan Jumlah Penduduk	%	37,16	38	42	44	48	51	51	38,70	37,56	39,40	39,77	66,16	66,16
7)	Jumlah Balai Latihan Kerja Yang Dibangun	Unit	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
8)	Jumlah Sarana dan Prasarana Latihan Kerja	Unit	6	6	7	7	8	10	10	6	8	8	8	17	17
9)	Jumlah peserta pelatihan yang lulus/menyelesaikan pelatihan	Orang	534	600	800	1500	2000	2500	2500	1360	2059	1237	2685	3141	3141

Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja. Pada tahun 2015, target Angka Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 70%, namun capaian pada tahun 2015 sebesar 65,07%. Angka ini membandingkan antara Angkatan Kerja dan jumlah Penduduk Usia Kerja. Angka Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2015 tidak mencapai target karena berdasarkan data statistik jumlah Bukan Angkatan Kerja cukup tinggi yang didominasi oleh Ibu-ibu Rumah Tangga yang Mengurus Rumah Tangga.

URAIAN	Penduduk Usia Kerja di Provinsi Kepulauan Riau				
	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
ANGKATAN KERJA	847.997	871.365	905.269	878.415	891.988
BEKERJA	781.824	824.567	848.660	819.656	836.670
PENGANGGUR	66.173	46.798	56.609	58.759	55.318
BUKAN ANGKATAN KERJA	408.704	443.911	475.049	453.617	478.901
SEKOLAH	105.228	99.473	108.549	95.419	127.128
MENGURUS RUMAH TANGGA	272.802	297.287	314.576	318.597	315.775
LAINNYA	30.674	47.151	51.924	39.601	35.998
PENDUDUK USIA KERJA	1.256.701	1.315.276	1.380.318	1.332.032	1.370.889
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,48	66,25	65,58	65,95	65,07
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,80	5,37	6,25	6,69	6,20
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	92,20	94,63	93,75	93,31	93,80

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah Pusdatinaker

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Kelompok Bukan Angkatan Kerja cukup tinggi (tahun 2015 sebesar 478.901 jiwa) yang terdiri dari:

- Anak-anak Usia Sekolah
- Ibu-ibu yang Mengurus Rumah Tangga
- Lainnya (penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial lainnya)

Sehingga berpengaruh terhadap Jumlah Angkatan Kerja, yang pada akhirnya mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Target jumlah balai latihan kerja yang dibangun pada tahun 2015 sebesar 2 unit, sedangkan realisasi tahun 2015 sebesar 1 unit. Dalam hal ini disebabkan karena keterbatasan pendanaan. Tahun 2015 hanya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau hanya melaksanakan pembuatan DED revitalisasi BLK.

Sedangkan indikator yang tidak tercapai tahun 2015, namun membaik dibandingkan tahun 2014 adalah:

1. Persentase jumlah angkatan kerja dibandingkan jumlah penduduk, pada tahun 2015 target sebesar 95% sedangkan capaian tahun 2015 sebesar 49,08% meningkat dibandingkan realisasi 2014 sebesar 42,62%. Hal ini dikarena adanya kesalahan indikator kinerja yang ditetapkan. Seharusnya **Persentase Jumlah Angkatan Kerja dibandingkan Jumlah Penduduk Usia Kerja**. Dan target indikator yang ditetapkan dinilai terlalu tinggi. Angka idealnya berkisar 65%-67%.

URAIAN	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
ANGKATAN KERJA	847.997	871.365	905.269	878.415	891.988
PENDUDUK USIA KERJA	1.256.701	1.315.276	1.380.318	1.332.032	1.370.889
Persentase	67,47	66,25	65,58	65,94	65,06

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah Pusdatinaker

2. Tingkat Pengangguran dari angkatan kerja, pada tahun 2015 target sebesar 4% sedangkan capaian tahun 2015 sebesar 6,20% lebih baik dibandingkan realisasi 2014 sebesar 6,69%. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain:

- a) Disaat pendataan bersamaan dengan kelulusan sekolah yang sebagian besar belum melanjutkan ke Universitas/Perguruan Tinggi.
- b) Tingginya angka deportasi TKI dari Malaysia yang sebagian besar tidak kembali ke daerah asal sehingga menambah angka pencari kerja/penganggur di Kepulauan Riau.

Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau

DAERAH	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Perkotaan	58.318	41.975	51.037	52.410	47.919
Perdesaan	7.855	4.823	5.572	6.349	7.399
JUMLAH	66.173	46.798	56.609	58.759	55.318
JENIS KELAMIN					
Laki-Laki	36.767	30.815	24.303	32.828	36.993
Perempuan	29.406	15.983	32.306	25.931	18.325
JUMLAH	66.173	46.798	56.609	58.759	55.318

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah Pusdatinaker

Angkatan Kerja Di Provinsi Kepulauan Riau

DAERAH	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Perkotaan	704.216	732.999	770.531	745.018	759.352
Perdesaan	143.781	138.366	134.738	133.397	132.636
JUMLAH	847.997	871.365	905.269	878.415	891.988
JENIS KELAMIN	2011	2012	2013	2014	2015
Laki-Laki	555.920	581.328	605.103	586.203	606.207
Perempuan	292.077	290.037	300.166	292.212	285.781
JUMLAH	847.997	871.365	905.269	878.415	891.988

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah Pusdatinaker

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan pelayanan pengembangan Perangkat Daerah:

Tenaga Kerja:

1. Masih banyaknya pengangguran dan belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja.
2. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, pelatihan berbasis kompetensi (sertifikasi) dan rendahnya penempatan pencari kerja.
3. Terjadinya kasus sengketa perusahaan dan tenaga kerja yang memerlukan penanganan.
4. Belum optimalnya upaya keselamatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja.
5. Maraknya demo serikat pekerja/buruh menolak regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
6. Maraknya demo serikat pekerja/buruh menolak penetapan upah minimum.
7. Posisi Kepulauan Riau sebagai pintu gerbang lintas migrasi antar negara, sehingga diperlukannya kerjasama untuk penanganan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan, penanganan keimigrasian, serta pengiriman dan pemulangan TKI.

Transmigrasi

1. Tidak tersedianya areal penempatan transmigrasi sehingga tidak dapat menempatkan transmigran.
2. Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan (lintas sektor, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) dalam sinergi program dan dukungan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

3. Semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi 2C (Clear and clean) dan 3L (layaj huni, layak usaha dan layak berkembang).
4. Masih adanya sisa beban tugas penyelesaian sertifikat kepemilikan lahan dan banyaknya permasalahan lahan yang perlu penanganan secara tepat.
5. Kurangnya keberpihakan kebijakan nasional dalam pengalokasian anggaran program transmigrasi.
6. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, serta hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

2.4.2 Peluang pelayanan pengembangan Perangkat Daerah:

2.4.2.1. Renstra Kementerian Ketenagakerjaan.

1. Meningkatnya keterampilan pekerja agar dapat memasuki pasar tenaga kerja. Besarnya minat/motivasi masyarakat untuk mengikuti pelatihan.
2. Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja.
3. Tersedianya kebijakan pengupahan sebagai payung hukum.
4. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antar serikat pekerja dan pengusaha.
5. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam menerapkan standar ketenagakerjaan utama.
6. Tersedianya informasi pasar tenaga kerja yang efektif untuk menghubungkan antar pencari kerja dengan industri.
7. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.
8. Dukungan anggaran Pusat untuk percepatan pencapaian Pelayanan bidang ketenagakerjaan.

9. Banyaknya lembaga-lembaga pelatihan swasta yang dapat bekerjasama dengan OPD.
10. Peningkatan jumlah peserta jaminan sosial bagi pekerja.

2.4.2.2. Renstra Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
2. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan meratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Dukungan anggaran Pusat untuk percepatan pencapaian Pelayanan bidang ketransmigrasian.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Permasalahan Ketenagakerjaan

Pembangunan daerah merupakan proses pengelolaan sumber-sumber daya yang ada oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya. Pemerintah daerah dengan sektor swasta membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi). Pembangunan memiliki berbagai tujuan, diantaranya untuk mengurangi disparitas/ketimpangan pembangunan antar daerah, antar sub daerah serta antar warga masyarakat demi pemerataan dan keadilan, memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan daerah adalah bagian internal dan integral dari pembangunan nasional, namun pencapaian keberhasilannya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Jalannya roda pembangunan di Kepulauan Riau tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Ekonomi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan positif, namun harus diakui bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan serta penambahan penduduk.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dibidang Ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain :

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial

1. Minimnya kualitas dan kuantitas mediator hubungan industrial yang memediasi kasus perselisihan.
2. Perselisihan hubungan industrial belum sepenuhnya diselesaikan melalui perjanjian bersama.
3. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan hubungan industrial terhadap pengusaha maupun pengusaha.
4. Pembinaan kepada perusahaan terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi buruh/pekerja masih belum optimal.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

1. Masih terbatasnya Tempat Uji Kompetensi (TUK) beserta sumber daya pendukungnya.
2. Belum optimalnya pembinaan produktivitas kerja kepada masyarakat maupun perusahaan.
3. Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja dan produktivitas dibandingkan jumlah kebutuhan.
4. Minimnya kualitas dan kuantitas fungsional pengantar kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja tidak bisa dilakukan secara optimal.
5. Sistem, mekanisme dan sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif.
6. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda dan berpendidikan kurang tertarik di sektor informal.
7. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal.
8. Terbatasnya alokasi dana pelayanan perluasan kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah penganggur yang ada.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

1. Kualitas dan kuantitas fungsional pengawas ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Belum optimalnya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.
3. Belum optimalnya mekanisme pelaporan pengawasan ketenagakerjaan.

Bidang UPT/ BLK

1. Minimnya kualitas dan kuantitas instruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pelatihan sehingga memperasosialisasi dan pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri, dunia pendidikan.
2. Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan
3. Masih belum berfungsinya BLK secara maksimal.
4. Masih belum terpenuhinya kebutuhan instruktur di BLK.

3.1.2 Permasalahan Ketransmigrasian.

1. Terdapatnya kerusakan dan kekurangan sarana dan prasarana di pemukiman dan kawasan transmigrasi.
2. Semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi 2C (*Clear and Clean*) dan 3L (Layak huni, Layak usaha dan Layak berkembang).
3. Masih adanya sisa beban tugas penyelesaian sertifikat kepemilikan lahan dan banyaknya permasalahan lahan yang perlu penanganan secara tepat.
4. Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan (lintas sektor, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat) dalam sinergi program dan dukungan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

5. Kurangnya keberpihakan kebijakan nasional dalam pengalokasian anggaran program transmigrasi.
6. Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi.
7. Kurangnya SDM baik pembina unit Permukiman Transmigrasi penyuluh pertanian, tenaga guru, maupun tenaga medis di unit permukiman Transmigrasi bina.
8. Masih lemahnya/kurangnya koordinasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan antara pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Masih banyaknya lahan transmigrasi (lahan pekarangan dan lahan usaha) yang belum bersertifikasi hak milik karena lahan tersebut belum ada HPL.
10. Kurangnya kemampuan SDM yang menangani bidang ketransmigrasian sehingga belum mampu mengimbangi tuntutan perubahan dan perkembangan yang ada.
11. Pengetahuan, ketrampilan, sikap transmigran dan penduduk sekitarnya yang masih rendah akan mempengaruhi taraf hidup dan kinerja yang dihasilkan.

Mengingat banyaknya permasalahan transmigrasi perlu dilakukan pemetaan permasalahan dan pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam dan terkoordinasi antar lintas sektor / instansi baik pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota, agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan secara tuntas dan pelaksanaan program transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan dapat terwujud.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5
Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.	Pelatihan kerja belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan tenaga kerja untuk menjadi terampil dan/atau kompeten	Minimnya kualitas dan kuantitas Instruktur & SDM pengelola pelatihan sehingga mempengaruhi proses, kapasitas & kualitas pelatihan.	Jumlah angkatan kerja yang tidak terampil/ kompeten masih tinggi	Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasarana pelatihan di UPT BLK.
		Belum maksimalnya sosialisasi & pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri, dunia pendidikan.	Sebagian Masyarakat belum mengenal UPT/BLK sehingga informasi program pelatihan yang dilaksanakan secara memadai	UPT BLK belum memberikan pelayanan pelatihan kerja secara optimal.
		Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan.	Sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan IT sehingga informasi program pelatihan melalui media elektronik belum terakses dengan baik.	
		Masih terbatasnya Tempat Uji Kompetensi beserta sumber daya pendukungnya.	Masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh pelayanan UPT BLK.	
		Belum optimalnya pembinaan produktivitas kerja kepada masyarakat maupun perusahaan.		
		Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja dan produktivitas dibandingkan jumlah kebutuhan.		

<p>Penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun informal masih relatif terbatas</p>	<p>Minimalnya kualitas dan kuantitas fungsional Pengantar Kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja tidak bisa dilakukan secara optimal.</p>	<p>Kualitas SDM angkatan kerja relatif rendah sehingga kurang memiliki daya saing untuk mendapat pekerjaan (tingkat pendidikan didominasi SD ke bawah).</p>	<p>Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yg belum diterima di pasar kerja.</p>
	<p>Sistem, mekanisme & sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal & efektif.</p>	<p>Lulusan dunia pendidikan belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan dunia usaha (mismatch).</p>	<p>Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal.</p>
	<p>Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal.</p>	<p>Lapangan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan pertambahan angkatan kerja.</p>	<p>Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal.</p>
	<p>Koordinasi lintas sektoral yg berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal & informal belum optimal.</p>	<p>Kualifikasi pencari kerja belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan pasar kerja.</p>	
	<p>Terbatasnya alokasi dana pelayanan penempatan & perluasan kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah penganggur yang ada.</p>	<p>Masih relatif kecilnya kepedulian perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja.</p>	
		<p>Peluang kerja di luar negeri masih didominasi jabatan/pekerjaan informal sehingga rentan dari segi perlindungan.</p>	
		<p>Angkatan kerja (terutama yg berusia muda) lebih memilih bekerja di sektor formal dibandingkan informal (faktor mindset).</p>	
		<p>Belum optimalnya sinkronisasi dan respon terhadap regulasi di</p>	

			bidang penempatan tenaga kerja.	
	Perselisihan hubungan Industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama belum optimal.	Minimnya kualitas dan kuantitas Mediator Hubungan Industrial yg memediasi kasus perselisihan.	Minimnya kepedulian perusahaan untuk membentuk LKS Bipartit diperusahaannya.	Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja.
		Perselisihan Hubungan Industrial belum sepenuhnya diselesaikan melalui perjanjian bersama.	Fungsi LKS Bipartit diperusahaan belum optimal sehingga banyak kasus perselisihan tidak dapat diselesaikan secara internal.	
		Belum optimalnya pembinaan kelembagaan hubungan industrial terhadap pengusaha maupun pekerja.	Regulasi aturan mengenai upah minimum masih belum bisa dijadikan acuan secara permanen.	
			Perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja.	
	Kepesertaan buruh/pekerja pada Program Jamsostek/BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan belum optimal.	Pembinaan kepada perusahaan terkait kepesertaan Jamsostek bagi buruh/pekerja masih belum optimal..	Kurangnya kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Jamsostek/ BPJS Ketenagakerjaan.	Perlindungan tenaga kerja melalui Program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan belum optimal.
	Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan (pemeriksaan perusahaan & pengujian peralatan di perusahaan) belum optimal.	Kualitas dan kuantitas fungsional Pengawas Ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan di Kepulauan Riau.	Minimnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan perusahaannya sesuai UU No. 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan diperusahaan.	Penerapan dan penegakan hukum norma ketenagakerjaan belum optimal.
		Belum optimalnya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.	Belum optimalnya kepatuhan perusahaan untuk menerapkan hukum norma ketenagakerjaan.	

		Belum optimalnya mekanis mepelaporan pengawasan ketenagakerjaan melalui Permenakertrans No. 09 Tahun 2005.		
Belum optimalnya pemindahan dan penempatan transmigrasi.		minimnya SDM yang membidangi Ketransmigrasian	Kurang optimalnya daerah penempatan transmigrasi dalam persiapan pemukiman (ketersediaan lahan, bangunan & sarpras lainnya) yg menyebabkan keterlambatan pemindahan transmigran.	
		Belum optimalnya implementasi UU No.29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.15 tentang Ketransmigrasian	Inkonsistensi tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antar daerah yang dilakukan	
		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak seimbangnnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi. - Masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum clear and clean. - Rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi. - Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya partisipas daerah dan swasta dalam pembangunan transmigrasi. - Masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak berkembang. 	Pelaksanaan program transmigrasi belum optimal.
	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan kerja belum sepenuhnya Mampu mengakomodir kebutuhan tenaga kerja untuk menjadi terampil dan/atau kompeten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum berfungsinya BLK secara maksimal, baik di Pusat maupun di daerah. - Masih belum terpenuhinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum sinkronnya kebijakan - ketenagakerjaan Pusat dengan - kebijakan/peraturan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pelatihan kerja belum optimal. - Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja di pasar kerja. - Informasi pasar kerja belum optimal. - Perluasan kesempatan kerja disektor

	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun informal masih relatif terbatas. - Iklim hubungan Industrial belum sepenuhnya kondusif. - Pengawasan Ketenagakerjaan belum optimal. 	<p>kebutuhan Instruktur di BLK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih perlunya penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan. - Terbatasnya kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan. - Rendahnya perlindungan bagi pekerja di luar negeri. - Masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih lemahnya lembaga hubungan industrial. - Masih tingginya pelanggaran ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja. - Masih banyaknya anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. - Masih rendahnya kompetensi TKI yang bekerja di luar negeri. - Banyaknya kesempatan kerja di dalam dan luar negeri yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia akibat ketidaksesuaian kompetensi. 	<p>informal belum berkembang secara optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih relatif tingginya konflik ketenagakerjaan. - Perlindungan tenaga kerja belum memadai. - Penerapan dan penegakan hukum ketenagakerjaan belum optimal.
--	---	---	--	---

3.2. Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Untuk mengenali faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong pelaksanaan pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau terhadap pencapaian visi, misi dan fokus program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

3.2.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*Desired Future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode Tahun 2016-2021 adalah:

”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim” .

3.2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi ”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”, misi yang ditempuh yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar Kabupaten/Kota.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Dari 9 (sembilan) misi Gubernur terpilih periode 2016-2021 yang menjadimisi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas yaitu:

Misi 3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.	Tersedianya tenaga kerja yang berkompentensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	95,25	95,50	95,75	96,00	96,25	96,50
	Meningkatnya mutu / kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas, bagi calon tenaga kerja, tenaga kerja (berbagai sektor usaha)	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	85,25	85,50	85,75	86,00	86,25	86,75
	Tersedianya sumberdaya pelatihan yang optimal dengan pengembangan jejaring kerjasama.	Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja	%	80	85	90	95	97	100
Mendorong perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja	Terciptanya kesempatan kerja sektor pertanian, industri, jasa yang layak, dan tercapainya perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	54,00	56,00	58,00	60,00	62,00	64,00
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,00	66,25	66,75	67,00	67,25	67,50
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,50	6,25	6,00	5,75	5,50	5,00
Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan dan bermartabat	Meningkatnya kualitas konsituen hubungan industrial, pemerintah, pekerja dan pengusaha	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	%	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00
Mewujudkan jaminan kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan, menjadi institusi andalan, dan menciptakan suasana yang nyaman dan produktif;	Meningkatnya cakupan tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
	Meningkatnya penerapan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja (SMK3) di tempat kerja.	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3	%	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mengembangkan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah	Berkembangnya kawasan transmigrasi yang cepat tumbuh, cepat berkembang dan terlaksananya pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai dengan kompetensinya	Jumlah Warga (KK) yang sesuai dengan rencana penempatan.	KK	1471	1471	1471	2730	2730	2730
		Memerlukan peran serta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi di daerah tertinggal, perbatasan/pulau terluar.	Kawasan	2	2	2	2	3	3

Dari misi ini dijabarkan sesuai dengan tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui program perluasan dan penempatan tenaga serta program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan berbagai pelatihan dan bekal ketrampilan yang memadai tenaga kerja siap bersaing di pasar kerja dan siap untuk ditempatkan baik dalam negeri maupun luar negeri dan melalui berbagai kegiatan diantaranya penempatan tenaga kerja, antar kerja lokal (AKL), antar kerja antar daerah (AKAD), antar kerja antar negara (AKAN) sesuai dengan kompetensi, selain dapat menciptakan lapangan kerja baru (peningkatan produktifitas) juga dapat menyerap tenaga kerja yang lainnya. Dengan penempatan tenaga kerja sesuai kompetensi maka tingkat pengangguran akan berkurang/dapat ditekan seminimal mungkin. Dan pada akhirnya apa yang menjadi visi, misi Gubernur yang dijabarkan ke dalam visi, misi Dinas dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan/dicita-citakan.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
Kepulauan Riau

VISI		<i>"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"</i>		
NO	MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
	<p>Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.</p>	<p><u>Pelatihan kerja :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana-prasarana pelatihan di UPT/BLK. - UPT /BLK belum memberikan pelayanan pelatihan kerja secara optimal. - Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja/angkatan kerja. <p><u>Penempatan tenaga kerja :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yg belum diterima di pasar kerja. - Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal. - Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal. <p><u>Hubungan Industrial :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingginya konflik ketenagakerjaan 	<p><u>INTERNAL : Pelatihan kerja :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya kualitas dan kuantitas Instruktur &SDM pengelola pelatihan sehingga mempengaruhi proses, kapasitas & kualitas pelatihan. - Belum maksimalnya sosialisasi & pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri, dunia pendidikan. - Masih terbatasnya modul dan standar standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan - Masih terbatasnya Tempat Uji Kompetensi beserta sumber daya pendukungnya. - Belum optimalnya pembinaan produktivitas kerja kepada masyarakat maupun perusahaan. Terbatasnya alokasi dana pelatihan terjadinya produktivitas dibandingkan jumlah kebutuhan. <p><u>Penempatan Tenaga kerja :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya kualitas dan kuantitas fungsional Pengantar Kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja tidak bisa dilakukan secara optimal. - Sistem, mekanisme & sarpras informasi kepada pencari kerja 	<p><u>INTERNAL :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi UPT/BLK menjadi bertaraf internasional. - Meningkatnya MoU dengan perusahaan & stakeholder lainnya terkait kerjasama dibidang pelatihan dan penempatan. - Rintisan laboratorium produktivitas untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. - Makin luasnya jejaring informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yg berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. - Peran tenaga kerja sarjana dalam informasi pasar kerja, serta sebagai pendamping & penggerak masyarakat untuk perluasan kerja di sektor informal. - Sistem Komputerisasi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri(Sisko KTKLN) serta Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) untuk meminimalkan masalah TKI. - Tim Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Prov. Kepri sebagai

		<p>dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja.</p> <p><u>Pengawasan ketenagakerjaan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan tenaga kerja melalui Program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan belum optimal. - Penerapan dan penegakan hukum norma ketenagakerjaan belum optimal 	<p>maupun perusahaan belum optimal & efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal. - Koordinasi lintas sektoral yg berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal& informal belum optimal. - Terbatasnya alokasi dana pelayanan penempatan & perluasan kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah penganggur yang ada. <p><u>Hubungan Industrial :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya kualitas dan kuantitas Mediator Hubungan Industrial yg memediasi kasus perselisihan. - Perselisihan Hubungan Industrial belum sepenuhnya diselesaikan melalui perjanjian bersama. - Belum optimalnya pembinaan kelembagaan hubungan industrial terhadap pengusaha maupun pekerja. <p><u>Pengawasan ketenagakerjaan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan kuantitas fungsional Pengawas Ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan di Kepri. - Lemahnya penegakan hukum norma ketenagakerjaan. - Belum optimalnya mekanisme pelaporan pengawasan ketenagakerjaan melalui Permenakertrans No. 09 Tahun 2005. - Pembinaan kepada perusahaan terkait kepesertaan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh/pekerja masih minim. <p>EKSTERNAL : Pelatihan kerja :</p>	<p>koordinasi lintasinstansi sektoral terkaitupaya penciptaan kesempatan kerja secara terpadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran URC(Unit Reaksi Cepat) dalam penanggulangan permasalahan hubungan industrial. - Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan untuk mendorong penegakanhukum norma ketenagakerjaan. - Satgas Sikat TKI Ilegaluntuk mendorong optimalisasi perlindungan TKI. - Rintisan Program Transmigrasi-AKAD terpadu mandiri untuk mengoptimalkan penempatan transmigrasi sekaligus penempatan Antar Kerja Antar Daerah. - Peraturan-peraturan Daerah Prov. Kepri dibidang ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian diantaranya Perda tentang penempatan dan perlindungan TKI, ijin mempekerjakan tenagaasing, ketransmigrasian,se rta penyerahan sebagianpelaksanaa n pekerjaan kepada perusahaan lain. <p>EKSTERNAL :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan IT sebagaisarana informasi yg memudahkan & memperluas jangkauan pelayanan. - Program CSR (CorporateSocial Responsibility) perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat. - Meningkatnya proporsi sekolah kejuruan untuk
--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah angkatan kerja yg tidak terampil/kompeten masih tinggi. - Sebagian masyarakat belum mengenal UPT/BLK sehingga tidak mendapat informasi program pelatihan yg dilaksanakan UPT/BLK secara memadai. - Sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan IT sehingga informasi program pelatihan melalui media elektronik belum terakses dengan baik. - Masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh pelayanan UPT/BLK. <p><u>Penempatan Tenaga kerja</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas SDM angkatan kerja relatif rendah sehingga kurang memiliki daya saing untuk mendapat pekerjaan (tingkat pendidikan didominasi SD ke bawah). - Lulusan dunia pendidikan belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan dunia usaha (mismatch). - Lapangan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan pertambahan angkatan kerja. - Kualifikasi pencari kerja belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan pasar kerja. - Masih relatif kecilnya kepedulian perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja. - Rendahnya animo pencari kerja untuk bekerja di Provinsi lain (lebih memilih mencari pekerjaan di Kepri). - Peluang kerja di luar negeri masih didominasi jabatan/pekerjaan informal sehingga rentan dari segi perlindungan. - Angkatan kerja (terutama yg berusia muda) lebih memilih bekerja di sektor formal dibandingkan informal (faktor mindset). 	<p>mencetak calon tenagakerja terampil/kompeten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Program Jamsostek menjadi BPJSKetenagakerjaan. - Rintisan kerjasama Province to Province dibidang ketenagakerjaan, dan transmigrasian. - Keberadaan lembaga/asosiasi profesi. - Peningkatan pembuatan PP (Peraturan Perusahaan) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) di perusahaan.
--	--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya sinkronisasi dan respon terhadap regulasi di bidang penempatan tenaga kerja. <p><u>Hubungan Industrial :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya kepedulian perusahaan untuk membentuk LKS Bipartit di perusahaannya. - Fungsi LKS Bipartit di perusahaan belum optimal sehingga banyak kasus perselisihan tidak dapat diselesaikan secara internal. - Regulasi aturan mengenai upah minimum masih belum bisa dijadikan acuan secara permanen. - Kurang optimalnya fungsinya Dewan Pengupahan & LKS Tripartit. - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja. <p><u>Pengawasan ketenagakerjaan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Jamsostek/ BPJS Ketenagakerjaan. - Minimnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan perusahaannya sesuai UU No.7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. - Belum optimalnya kepatuhan perusahaan untuk menerapkan hukum norma ketenagakerjaan. 	
	<p>Misi 5 (lima) yaitu Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan</p>	<p><u>Ketransmigrasian :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan KK Yang Dibina Di Kawasan Transmigrasi 	<p>INTERNAL :</p> <p><u>Ketransmigrasian :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya SDM yang membidangi Ketransmigrasian. - Belum optimalnya implementasi UU no. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no.15 Tahun 1999 tentang Ketransmigrasian. <p>EKSTERNAL :</p> <p><u>Ketransmigrasian :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang optimalnya 	<p><u>Ketransmigrasian :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan KK Yang Dibina Di Kawasan Transmigrasi

	antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan		daerah penempatan transmigrasi dalam persiapan pemukiman - Inkonsistensi tindak lanjut dari perkajian kerja sama anatar daerah yang telah dilakukan.	
--	---	--	---	--

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, maka visi pembangunan nasional untuk 5 (lima) tahun ke depan (Tahun 2015-2019) adalah :

“ Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan salah satu hal yang perlu mendapatkan prioritas adalah Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Dalam agenda ini, peningkatan daya saing tenaga kerja menjadi salah satu aspek pembangunan yang sangat penting;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015 – 2019 baik dari isi visi maupun misi yang ada akan dijadikan acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan visi, misi dinas yang merupakan penjabarandari visi misi Gubernur terpilih periode Tahun 2016-2021. Mengingat apa yang

menjadi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Kepulauan Riau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permasalahan nasional baik masalah kepadatan/pemerataan penduduk melalui program transmigrasi dan khususnya masalah ketenagakerjaan. Untuk itu antara baik visi, misi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau harus selaras dan sinergi agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan baik bidang ketenagakerjaan maupun ketransmigrasian melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan serta melalui dukungan dana yang ada.

Permasalahan pelayanan ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dapat diidentifikasi berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan dengan uraian berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	JAJARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	SEBAGAI FAKTOR

			PENGHAMBAT	PENDOROG

	2	3	4	5

	<p>Kementerian Ketenagakerjaan</p>	<p>Pelatihan kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana-prasarana pelatihan di UPT BLK. ✓ UPT BLK belum memberikan pelayanan pelatihan kerja secara optimal. ✓ Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja/angkatan kerja. <p>Penempatan tenaga kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yg belum diterima di pasar kerja. ✓ Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal. - Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal. <p>Hubungan Industrial :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja. <p>Pengawasan ketenagakerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perlindungan tenaga kerja melalui Program Jamsostek belum optimal. - Penerapan dan penegakan hukum norma ketenagakerjaan belum optimal. 	<p>INTERNAL Pelatihan Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya kualitas dan kuantitas Instruktur & SDM pengelola pelatihan sehingga mempengaruhi proses, kapasitas & kualitas pelatihan. 2. Belum maksimalnya sosialisasi & pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri, dunia pendidikan. 3. Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan. 4. Masih terbatasnya Tempat Uji Kompetensi beserta sumber daya pendukungnya. 5. Belum optimalnya pembinaan produktivitas kerja kepada masyarakat maupun perusahaan. 6. Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja dan produktivitas dibandingkan jumlah kebutuhan 	<p>INTERNAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi UPT PK/BLK menjadi bertaraf internasional. 2. Meningkatnya MoU dengan perusahaan & stakeholder lainnya terkait kerjasama di bidang pelatihan dan penempatan. 3. Rintisan laboratorium produktivitas untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. 4. Makin luasnya jejaring informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yg berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. 5. Peran tenaga kerja sarjana dalam informasi pasar kerja, serta sebagai pendamping & penggerak masyarakat untuk perluasan kerja di sektor informal. 6. Sistem Komputerisasi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko KTKLN) serta Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) untuk meminimalkan masalah TKI. 7. Tim Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Prov. Kepri sebagai koordinasi lintas instansi sektoral terkait upaya penciptaan kesempatan kerja secara terpadu. 8. Peningkatan peran URC (Unit Reaksi Cepat) dalam penanggulangan permasalahan hubungan industrial. 9. Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan untuk mendorong penegakan hukum norma ketenagakerjaan. 10. Satgas Sikat TKI Ilegal untuk mendorong optimalisasi perlindungan TKI. 11. Rintisan Program Transmigrasi-AKAD terpadu mandiri untuk mengoptimalkan penempatan transmigrasi sekaligus penempatan Antar Kerja Antar Daerah. 12. Peraturan-peraturan Daerah Prov. Kepri di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. diantaranya Perda tentang penempatan dan perlindungan TKI, ijin mempekerjakan tenaga asing, ketransmigrasian, serta penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. <p>EKSTERNAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan IT sebagai sarana informasi yg memudahkan & memperluas jangkauan pelayanan.
--	------------------------------------	---	--	--

			<p>Penempatan Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya kualitas dan kuantitas fungsional Pengantar Kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja tidak bisa dilakukan secara optimal. 2. Sistem, mekanisme & sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal & efektif. 3. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal. 4. Koordinasi lintas sektoral yg berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal & informal belum optimal. 5. Terbatasnya alokasi dana pelayanan penempatan & perluasan kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah penganggur yang ada. <p>Hubungan Industrial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya kualitas dan kuantitas Mediator Hubungan Industrial yg memediasi kasus perselisihan. 2. Perselisihan Hubungan Industrial belum sepenuhnya diselesaikan melalui perjanjian bersama. 3. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan hubungan industrial terhadap pengusaha maupun pekerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Program CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatnya proporsi sekolah kejuruan untuk mencetak calon tenaga kerja terampil/kompeten. 4. Perubahan Program Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. 5. Rintisan kerjasama Province to Province dibidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian 6. Keberadaan lembaga/asosiasi profesi. 7. Peningkatan pembuatan PP (Peraturan Perusahaan) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) di perusahaan.
--	--	--	--	--

			<p>Pengawasan Ketenagakerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan kuantitas fungsional Pengawas Ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan di Kepulauan Riau. 2. Lemahnya penegakan hukum norma ketenagakerjaan. 3. Belum optimalnya mekanisme pelaporan pengawasan ketenagakerjaan melalui Permenakertrans No. 09 Tahun 2005. 4. Pembinaan kepada perusahaan terkait kepesertaan Jamsostek bagi buruh/pekerja masih minim. <p>Pelatihan Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah angkatan kerja yg tidak terampil/ kompeten masih tinggi. 2. Sebagian masyarakat belum mengenal UPT BLK sehingga tidak mendapat informasi program pelatihan yg dilaksanakan UPT BLK secara memadai. 3. Sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan IT sehingga informasi program pelatihan melalui media elektronik belum terakses dengan baik. 4. Masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh pelayanan UPT BLK. <p>Penempatan Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM angkatan kerja relatif rendah sehingga kurang memiliki daya saing untuk mendapat pekerjaan (tingkat pendidikan didominasi SD ke bawah). 2. Lulusan dunia pendidikan belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan dunia usaha (mismatch). 3. Lapangan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan pertambahan 	

			<p>angkatan kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kualifikasi pencari kerja belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan pasar kerja. 5. Masih relatif kecilnya kepedulian perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja. 6. Rendahnya animo pencari kerja untuk bekerja di Provinsi lain (lebih memilih mencari pekerjaan di Provinsi Kepulauan Riau). 7. Peluang kerja di luar negeri masih didominasi jabatan/pekerjaan informal sehingga rentan dari segi perlindungan. 8. Angkatan kerja (terutama yg berusia muda) lebih memilih bekerja di sektor formal dibandingkan informal (faktor mindset). 9. Belum optimalnya sinkronisasi dan respon terhadap regulasi di bidang penempatan tenaga kerja. <p>Hubungan Industrial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya kepedulian perusahaan untuk membentuk LKS Bipartit di perusahaannya. 2. Fungsi LKS Bipartit di perusahaan belum optimal sehingga banyak kasus perselisihan tidak dapat diselesaikan secara internal. 3. Regulasi aturan mengenai upah minimum masih belum bisa dijadikan acuan secara permanen. - Kurang optimalnya fungsinya Dewan Pengupahan & LKS Tripartit. 4. Perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja. <p>Pengawasan Ketenagakerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Jamsostek. 2. Minimnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan perusahaannya sesuai UU No. 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. 	
	<p>Rencana Strategis Tahun 2016-2021</p>		<ol style="list-style-type: none"> 3. Belum optimalnya kepatuhan perusahaan untuk menerapkan hukum norma ketenagakerjaan. 	<p>70</p>

2	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ketransmigrasian : Pemberdayaan KK Yang Dibina Di Kawasan Transmigrasi	<p>INTERNAL: Ketransmigrasian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya SDM yang membidangi Ketransmigrasian. 2. Belum optimalnya implementasi UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 15 Tahun 1999 tentang Ketransmigrasian. <p>EKSTERNAL: Ketransmigrasian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang optimalnya daerah penempatan transmigrasi dalam persiapan pemukiman (ketersediaan lahan, bangunan & sarpras lainnya) yg menyebabkan keterlambatan pemindahan transmigran. 2. Inkonsistensi tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antar daerah yg telah dilakukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan-Peraturan Daerah Prov.Kepulauan Riau bidang ketransmigrasian
---	---	--	---	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penataan ruang di daerah sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah disekitarnya. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2014 belum ditetapkan. Kepulauan Riau menjadi bagian dari 8 Provinsi yang belum menetapkan Perda RTRW. Meskipun demikian Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2033.

Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 5 Kabupaten telah memiliki Peraturan Daerah tentang RTRW, sedangkan Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang belum ditetapkan dengan Perda.

- 1) Kabupaten Karimun, ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karimun tahun 2011-2031
- 2) Kabupaten Anambas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.3 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Anambas tahun 2011-2031
- 3) Kabupaten Bintan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.2 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031
- 4) Kabupaten Lingga, ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.7 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031
- 5) Kabupaten Natuna, ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031.

Dalam rangka implementasi kebijakan tata ruang dan sebagai perangkat operasional RTRW sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR), Kabupaten/Kota yang telah memiliki RTRW wajib menyusun rencana teknis yang dimuat dalam RDTRK.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Pembangunan daerah transmigrasi semula dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan penduduk agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah, namun dengan berjalannya waktu penempatan transmigrasi bukan saja bertujuan untuk pemerataan penduduk namun lebih luas untuk pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah perkotaan dan pedesaan dan untuk mengangkat perekonomian masyarakat transmigrans juga penduduk sekitar lokasi transmigrasi agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan selanjutnya tingkat kesejahteraan masyarakat transmigran dan penduduk sekitar meningkat dan daerah tersebut menjadi berkembang dan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

tenaga kerja dan transmigrasi. Adapun urusan pemerintahan yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau meliputi 2(dua) urusan yakni :

- a. 1 (dua) urusan wajib, terdiri dari (1) ketenagakerjaan.
- b. 1 (satu) urusan pilihan, yaitu ketransmigrasian.

Pada pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tidak bisa berjalan optimal, yaitu

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.
2. Tingginya pengangguran terbuka.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
4. Belum optimalnya pengelolaan wilayah transmigrasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan sasaran;
 - a. Tersedianya tenaga kerja yang berkompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - b. Meningkatnya mutu / kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas, bagi calon tenaga kerja, tenaga kerja (berbagai sektor usaha)
 - c. Terciptanya sumberdaya pelatihan yang optimal dengan pengembangan jejaring kerjasama.
- 2) Mendorong perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja dengan sasaran Terciptanya kesempatan kerja sektor pertanian, industri, jasa yang layak, dan tercapainya

perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri

- 3) Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan dan bermartabat dengan sasaran Meningkatnya kualitas konsituen hubungan industrial, pemerintah,pekerja dan pengusaha;
- 4) Mewujudkan jaminan kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan, menjadi institusiandalan, dan menciptakan suasana yang nyaman dan produktif dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya cakupan tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.
 - b. Meningkatnya Penerapan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja(SMK3) di tempat kerja.
- 5) Mengembangkan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah dengan sasaran:
 - a. Berkembangnya kawasan transmigrasi yang cepat tumbuh, cepat berkembang dan terlaksananya pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai dengan kompetensinya.

Secara rinci keterkaiatn tujuan dan sasaran dengan indikator yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program					Kondisi Kinerja akhir RPJMD
								Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1					2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan serta dapat diterima kerja	Tersedianya tenaga kerja yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	95,00	47,63	47,75	47,88	48	48,13	48,25	48,25
			Meningkatnya mutu / kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas, bagi calon tenaga kerja, tenaga kerja (berbagai sektor usaha)	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	85,00	42,63	42,74	42,88	43	43,13	43,25	43,25
			Tersedianya sumberdaya pelatihan yang optimal dengan pengembangan jejaring kerjasama	Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja		Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja	%	80	80	85	90	95	97	100	100
2	Mendorong	Besaran pencari	Terciptanya	Pencari kerja terdaftar yang	Program Penempatan	Pencari kerja terdaftar yang	%	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	62,00	64,00	64,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program					Kondisi Kinerja akhir RPJMD
								Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1					2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja	kerja yang dapat ditempatkan, meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	kesempatan kerja sektor pertanian, industri, jasa yang layak, dan tercapainya perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri	ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	dan Perluasan	ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	% %	65,07 6,20	66,00 7,69	66,25 7,28	66,75 6,89	67,00 6,53	67,25 6,18	67,50 5,84	67,50 5,84
3	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan dan bermartabat	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	Meningkatnya kualitas hubungan industrial, pemerintah, pekerja dan pengusaha.	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	%	20,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	28,00
4	Mewujudkan jaminan kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan, menjadi institusi	Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap norma-norma ketenagakerjaan dan besaran kasus	Meningkatnya cakupan tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan dan Penerapan sistem manajemen	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan	% %	42,75 0,70	70,00 1,00	75,00 1,50	80,00 2,00	85,00 2,50	90,00 3,00	95,00 3,50	95,00 3,50

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program					Kondisi Kinerja akhir RPJMD
								Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1					2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	andalan, dan menciptakan suasana yang nyaman dan produktif.	ketenagakerjaan yang dapat ditangani	keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di tempat kerja.	SMK3		SMK3									
				Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani		Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	65	65	70	75	80	85	90	90
5	Mengembangkan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah.	Jumlah kawasan transmigrasi yang dapat dikembangkan dalam mendukung pembangunan daerah	Berkembangnya kawasan transmigrasi yang cepat tumbuh, cepat berkembang dan terlaksananya pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai dengan penempatannya	Jumlah Warga (KK) yang sesuai dengan rencana penempatan	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Warga (KK) yang sesuai dengan rencana penempatan	KK	1471	1471	1471	1471	1471	2730	2730	2730
				Jumlah kawasan yang dikembangkan menjadi wilayah pengembangan transmigrasi		Jumlah kawasan yang dikembangkan menjadi wilayah pengembangan transmigrasi	Kawasan	2	2	2	2	2	3	3	3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan strategi :

- a. Pengembangan sistem standarisasi kompetensi dan kompatibel,
- b. Pengembangan sistem pelatihan kerja yang mengacu kepada kebutuhan dunia kerja,
- c. Memperluas jejaring kerjasama bidang standarisasi, sertifikasi dan pelatihan,

2. Mendorong perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja, dengan strategi :

- a. Menyusun, mengembangkan dan menerapkan rencana tenaga kerja sektoral,
- b. Mengembangkan dan mensosialisasikan model-model serta memfasilitasi, penciptaan kesempatan kerja yang produktif, *renumerative* dan layak , berbasis masyarakat dan penerapan prinsip jiwa dan semangat sukarela, dan kemandirian di berbagai sektor formal maupun informal,
- c. Mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan pelayanan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja yang berbasis masyarakat dengan penerapan prinsip jiwa dan semangat kemandirian, sistem padat karya dan teknologi tepat guna,

3. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat, dengan strategi :

- a. Pengaturan syarat-syarat kerja,
- b. Pengaturan pengupahan,
- c. Pengaturan kelembagaan hubungan industrial,
- d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan industrial yang sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan, menjadi istitusi andalan, dan menciptakan suasana yang nyaman dan produktif, dengan strategi :

- a. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait,
- b. Pemantapan sistem pengawasan ketenagakerjaan,
- c. Pengembangan strategi dan program dalam rangka pencapaian penanganan substansi teknis pengawasan ketenagakerjaan.

5. Mengembangkan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah, dengan strategi :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi,
- b. Memelihara dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana permukiman transmigrasi,
- c. Meningkatkan kualitas keserasian lingkungan, mengintegrasikan masyarakat dan kawasan transmigrasi dengan wilayah sekitarnya.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan diatas, kebijakan yang ditempuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

1. Kebijakan Umum

- a. Mendorong penciptaan lapangan kerja formal yang seluas-luasnya,
- b. Peningkatan kualitas keterampilan dan profesionalisme tenaga kerja/pencari kerja melalui sertifikasi profesi.
- c. Memfasilitasi peningkatan produktivitas tenaga kerja,
- d. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis cepat tumbuh.

2. Kebijakan Khusus

a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan kebijakan :

Peningkatan kualitas dan produktivitas melalui pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi, kelembagaan pelatihan dan produktivitas, pelatihan transmigrasi, pengembangan jejaring kerjasama, peningkatan pelatihan dan pemagangan dan peran serta dunia usaha untuk bidang-bidang yang prospektif dan berorientasi pada pasar kerja.

b. Mendorong perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja, dengan kebijakan :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat penganggur melalui penerapan teknologi tepat guna, pengembangan sistem padat karya, pengembangan tanga kerja mandiri dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela,
2. Pengembangan sistem antar kerja penempatan tenaga kerja umum dan khusus,
3. Peningkatan kinerja lembaga bursa kerja dalam rangka mewujudkan informasi pasar kerja yang optimal serta menginformasikan rencana penempatan tenaga kerja secara makro dan mikro,

4. Peningkatan penerapan sistem analisa jabatan dan informasi jabatan.

c. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat, dengan kebijakan :

Pembuatan dan penerapan peraturan di bidang hubungan industrial yang ramah investasi dengan mempertimbangkan perlindungan bagi pengusaha dan pekerja.

d. Mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan, menjadi istitusi andalan, dan menciptakan suasana yang nyaman dan produktif, dengan kebijakan :

Penegakan hukum ketenagakerjaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

e. Mengembangkan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah, dengan kebijakan :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi diarahkan kepada terwujudnya rencana yang sesuai dengan potensi yang tersedia, mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sesuai dengan perkembangan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah dan pembangunan regional,

Peningkatan kemampuan masyarakat diarahkan kepada terwujudnya transmigrasi dan penduduk sekitar yang memiliki kemampuan untuk berkembang untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang produktif, mandiri dan harmonis.

**TABEL 4.2.
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program**

VISI: Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahterah, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan, dan unggul di Bidang Maritim						
MISI: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Ketrampilan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga Memiliki Daya Saing Tinggi						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>			
<i>1</i>	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.	1. Tersedianya tenaga kerja yang berkompentensi sesuai dengankebutuhan pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. 2. Meningkatnya mutu / kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas, bagi calon tenaga kerja, tenaga kerja (berbagai sektor usaha) 3. Tersedianya sumberdaya	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. 3. Persentase lulusan BLK yang diterima kerja.	1. Pengembangan sistem standarisasi kompetensi dan kompatibel, 2. Pengembangan sistem pelatihan kerja yang mengacu kepada kebutuhan dunia kerja, 3. Memperluas jejaring kerjasama bidang standarisasi, sertifikasi dan pelatihan,	Peningkatan kualitas dan produktivitas melalui pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi, kelembagaan pelatihan dan produktivitas, pelatihan transmigrasi, pengembangan jejaring kerjasama, peningkatan pelatihan dan pemagangan dan peran serta dunia usaha untuk bidang bidang yang prospektif dan berorientasi pada pasar kerja.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

		pelatihan yang optimal dengan pengembangan jejaring kerjasama				
2	Mendorong perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja	1. Terciptanya kesempatan kerja sektor pertanian, industri, jasa yang layak, dan tercapainya perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri	1. Pencari Kerja Yang Ditempatkan 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. 3. Tingkat Pengangguran Terbuka.	1. Menyusun, mengembangkan dan menerapkan rencana tenaga kerja sektoral, 2. Mengembangkan dan mensosialisasikan model-model sertamemfasilitasi, penciptaan kesempatan kerja yang produktif, <i>renumerative</i> dan layak , berbasis masyarakat dan penerapan prinsip jiwa dan semangat sukarela, dan kemandirian di berbagai sektor formal maupun informal, 3. Mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat penganggur melalui penerapan teknologi tepat guna, pengembangan sistem padat karya, pengembangan tanga kerja mandiri dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela, 2. Pengembangan sistem antar kerja penempatan tenaga kerja umum dan khusus, 3. Peningkatan kinerja lembaga bursa kerja dalam rangka mewujudkan informasi pasar kerja yang optimal sertamenginformasikan rencana penempatan	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

				<p>elayanan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja yang berbasis masyarakat dengan penerapan prinsip jiwa dan semangat kemandirian, sistem padat karya dan teknologi tepat guna,</p>	<p>tenaga kerja secara makro dan mikro, 4. Peningkatan penerapan sistem analisa jabatan dan informasi jabatan.</p>	
3	<p>Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan dan bermartabat</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas konsituen hubungan industrial, pemerintah, pekerja dan pengusaha;</p>	<p>Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan.</p>	<p>1. Pengaturan syarat-syarat kerja, 2. Pengaturan pengupahan, 3. Pengaturan kelembagaan hubungan industrial, 4. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan industrial yang sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pembuatan dan penerapan peraturan di bidang hubungan industrial yang ramah investasi dengan mempertimbangkan perlindungan bagi pengusaha dan pekerja.</p>	<p>Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p>
4	<p>Mewujudkan jaminan kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan, menjadi institusi andalan, dan menciptakan suasana yang nyaman dan produktif;</p>	<p>1. Meningkatnya cakupan tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.</p>	<p>1. Persentase kepesertaan BPJS kerenagakerjaan. 2. Meningkatkan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja dan</p>	<p>1. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, 2. Pemantapan sistem pengawasan ketenagakerjaan,</p>	<p>Penegakan hukum ketenagakerjaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.</p>	<p>Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan</p>

		2. Meningkatnya Penerapan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja (SMK3) di tempat kerja.	kesehatan kerja (SMK3) di tempat kerja.	3. Pengembangan strategi dan program dalam rangka pencapaian penanganan substansi teknis pengawasan ketenagakerjaan.		
Mengembangkan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah	1. Berkembangnya kawasan transmigrasi yang cepat tumbuh, cepat berkembang dan terlaksananya pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai dengan kompetensinya.	1. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan kaw yang tersedia dengan pemeng	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, 2. Memelihara dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana permukiman transmigrasi, 3. Meningkatkan kualitas keserasian lingkungan, mengintegrasikan masyarakat dan kawasan transmigrasi dengan wilayah sekitarnya.	1. Peningkatan kualitas perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi diarahkan kepada terwujudnya rencana yang sesuai dengan potensi yang tersedia, mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sesuai dengan perkembangan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah dan pembangunan regional, 2. Peningkatan kemampuan masyarakat diarahkan	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	

					kepada terwujudnya transmigrasi dan penduduk sekitar yang memiliki kemampuan untuk berkembang untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang produktif, mandiri dan harmonis.	
--	--	--	--	--	--	--

				Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3	%	0,70	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	3,50
				Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani		Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	65	65	70	75	80	85	90	90
5	Mengembangkan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah.	Jumlah kawasan transmigrasi yang dapat dikembangkan dalam mendukung pembangunan daerah	Berkembangnya kawasan transmigrasi yang cepat tumbuh, cepat berkembang dan terlaksananya pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai penempatannya	Jumlah Warga (KK) yang sesuai dengan rencana penempatan	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Warga (KK) yang sesuai dengan rencana penempatan	KK	1471	1471	1471	1471	1471	2730	2730	2730
				Jumlah kawasan yang dikembangkan menjadi wilayah pengembangan transmigrasi		Jumlah kawasan yang dikembangkan menjadi wilayah pengembangan transmigrasi	Kawasan	2	2	2	2	2	2	3	3

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab VI ini, akan diuraikan mengenai rencana program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya. Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau merupakan program prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, program prioritas dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.:

Adapun program dan kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan selama lima tahun (Tahun 2016-2021) adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Biaya Rutin Dukungan BLK Provinsi Kepulauan Riau.
 - b. Training dan peningkatan kapasitas dan kualitas mengajar instruktur.
 - c. Pengembangan sarana
 - d. Jejaring Kerjasama dan Promosi BLK.
 - e. Pengadaan Peralatan dan Mesin Pelatihan dalam Rangka Pengembangan Workshop Menjadi Tempat Uji Kompetensi.
 - f. Peningkatan Profesionalisme, Upgrading dan Pelatihan Instruktur.

- g. Peningkatan Kerjasama dengan Balai Besar dalam rangka optimalisasi pelatihan.
 - h. Pengembangan modul ajar pelatihan.
 - i. Pelatihan Berbasis model Mobile Training Unit.
 - j. Pelatihan Upgrading Metodologi Pelatihan
 - k. Pelatihan Teknik Manufaktur (Instalasi Pipa)
 - l. Pelatihan Teknik Las
 - m. Pelatihan Teknik Listrik
 - n. Pelatihan Teknik Elektronika
 - o. Pelatihan Refrigeration
 - p. Pelatihan Teknisi Komputer
 - q. Pelatihan Teknik Otomotif
 - r. Pelatihan Garmen Apparel (Menjahit)
 - s. Diklat dan Sertifikasi Assesor
 - t. Peningkatan Kelembagaan LPK
2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pemberdayaan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Produktif/ Manufaktur.
 - b. Pemberdayaan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Infrastruktur.
 - c. Bimbingan Teknis Pelayanan Penempatan di Kota/Kab. (Bimtek IPK, Petugar Antar Kerja, Pengantar Kerja).
 - d. Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja Asing di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
 - e. Sosialisasi UU Ketenagakerjaan Tentang Wajib lapor Perusahaan, Penyelenggaraan AKAD dan pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 - f. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Penempatan di Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

- g. Peningkatan dan Pendataan, Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia
 - h. Bimbingan Teknis Pemandu Wira Usaha Baru
 - i. Pelatihan Peningkatan SDM (Tenaga kerja Dalam Negeri)
 - j. Pemberdayaan Perluasan Kerja Teknologi Tepat Guna
 - k. Pelatihan Kewirausahaan
 - l. Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Pendamping
3. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program K3 dan BPJS di Perusahaan-Perusahaan Provinsi Kepulauan Riau.
 - b. Operasional UPTD Pengawasan Provinsi Kepulauan Riau.
 - c. Rapat Koordinasi Teknis Daerah dan Bedah Kasus Pengawas Ketenagakerjaan.
 - d. Bimtek Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak.
 - e. Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
 - f. Rapat Koordinasi dan Monitoring Pekerjaan Terburuk Anak.
 - g. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja..
 - h. Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Perusahaan.
4. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi dan sinkronisasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau.

- b. Peningkatan Peran Lembaga Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan LKS Tripartit Provinsi Kepulauan Riau
 - c. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - d. Bimbingan Teknik negosiasi Penanganan kasus Perselisihan Hubungan Industrial.
 - e. Bimtek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Perusahaan.
 - f. Bimtek waktu kerja lembur dan upah kerja lembur di Perusahaan.
 - g. Sosialisasi perlindungan pekerja/buruh pada norma Jamsostek/BPJS.
 - h. Bimbingan Teknis Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh.
 - i. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
 - j. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kelembagaan dan Hubungan Industrial.
 - k. Pembinaan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan
 - l. Bimbingan Teknis Pembentukan LKS Bipartit.
 - m. Sosialisasi Peraturan Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.
 - n. Bimbingan Teknis Kesejahteraan Pekerja Melalui Koperasi Pekerja.
 - o. Penyuluhan Tentang Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak dan Pencegahannya.
5. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perpindahan dan penempatan transmigrasi
 - b. Fasilitasi kawasan pemukiman transmigrasi yang tertata
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
 - c. Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran
7. Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Rapat Kerja Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Se-Provinsi Kepulauan Riau
 - b. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
 - c. Training Of Trainer Perencanaan Tenaga Kerja Makro
 - d. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
 - e. Penyusunan Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau
 - f. Penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
 - g. Rapat Koordinasi Program Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
8. Program Pengembangan Data/ Informasi dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengelolaan Website Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pasar Kerja
9. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - b. Monitoring dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Se-Provinsi Kepulauan Riau
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Peningkatan Kapasitas Organisasi
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan dan pendanaan indikatif dapat dilihat sebagai berikut:

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN																		
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
PROVINSI KEPULAUAN RIAU																		
TAHUN 2016-2021																		
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KRJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.	Tersedianya tenaga kerja yang berkompentensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.		Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	47.63%	47.75%		47.88%		48%		48.13%		48.25%		48.25%			
	Tersedianya Sumber Daya Pelatihan Yang Optimal Dengan Pengembangan Jejaring Kerja sama		Persentase Lulusan BLK Yang Diterima Kerja	80%	85%		86%		87%		88%		89%		89%			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.				9,288,687,500		10,250,000,000		5,425,000,000		6,250,000,000		8,950,000,000		40,163,687,500		
		Pelatihan AK3 Umum Di Batam	Terlaksananya Pelatihan AK3 Umum Di Batam		1 Kegiatan	200,000,000											DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Scaffolding Di Karimun	Terlaksananya Pelatihan Scaffolding Di Karimun		1 Kegiatan	200,000,000											DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Angkat Angkut Di Karimun	Terlaksananya Pelatihan Angkat Angkut Di Karimun		1 Kegiatan	200,000,000											DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Rigger Di Batam	Terlaksananya Pelatihan Rigger Di Batam		1 Kegiatan	200,000,000											DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Sertifikasi Teknisi Listrik	Terlaksananya Pelatihan Teknik Listrik		1 Kegiatan	1,000,000,000							1 Kegiatan	500,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Peningkatan Kemampuan Calon Kompetitor Industrial Automation (ASC) XII	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kemampuan calon Kompetitor Industrial Automation (ASC) XII		1 Kegiatan	350,000,000											DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Mechatronics	Terlaksananya Pelatihan Mechatronics		1 Kegiatan	350,000,000											DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Biaya Rutin Dukungan BLK Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Dukungan BLK Provinsi Kepulauan Riau		1 Kegiatan	504,962,500	1 Kegiatan	600,000,000	1 Kegiatan	625,000,000	1 Kegiatan	695,000,000	1 Kegiatan	795,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Biaya Dukungan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Secara Terpadu Satu Atap	Terlaksananya Dukungan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Secara Terpadu Satu Atap		1 Kegiatan	1,000,000,000	1 Kegiatan	1,000,000,000	1 Kegiatan	1,000,000,000	1 Kegiatan	1,000,000,000	1 Kegiatan	1,000,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Servis Sepeda Motor	Terlaksananya Pelatihan Servis Sepeda Motor		1 Kegiatan	173,000,000							1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Satuan Pengamanan (SATPAM)	Terlaksananya Pelatihan Satuan Pengamanan (SATPAM)		1 Kegiatan	450,000,000							1 Kegiatan	250,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Operator Alat Berat	Terlaksananya Pelatihan Operator Alat Berat		1 Kegiatan	436,000,000							1 Kegiatan	250,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Menjahit	Terlaksananya Pelatihan Menjahit		1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Bubut Logam	Terlaksananya Pelatihan Bubut Logam		1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Listrik Di kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga	Terlaksananya Pelatihan Listrik Di kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga		1 Kegiatan	867,000,000											DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KRJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.	Tersedianya tenaga kerja yang berkompentensi sesuai dengankebutuhan pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.	Tersedianya Sumber Daya Pelatihan Yang Optimal Dengan Pengembangan Jejaring Kerja sama	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	47.63%	47.75%		47.88%		48%		48.13%		48.25%		48.25%			
	Persentase Lulusan BLK Yang Diterima Kerja		80%	85%		86%		87%		88%		89%		89%				
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.				9,288,687,500		10,250,000,000		5,425,000,000		6,250,000,000		8,950,000,000		40,163,687,500		
		Pelatihan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut		1 Kegiatan	1,000,000,000							1 Kegiatan	500,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Sertifikasi P3K	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi P3K		1 Kegiatan	1,000,000,000							1 Kegiatan	500,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Komputer	Terlaksananya Pelatihan Komputer		1 Kegiatan	125,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Teknik Pendingin	Terlaksananya Pelatihan Teknik Pendingin		1 Kegiatan	155,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Teknik Listrik	Terlaksananya Pelatihan Teknik Listrik				1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Otomotif Di Kabupaten Karimun	Terlaksananya Pelatihan Otomotif Di Kabupaten Karimun		1 Kegiatan	400,000,000											DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Design Grafis	Terlaksananya Pelatihan Design Grafis				- 1 Kegiatan	200,000,000									DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunikasi Pemagangan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunikasi Pemagangan				- 1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	250,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Sertifikasi Petugas Kebakaran Kelas D	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Petugas Kebakaran Kelas D				- 1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan		- 1 Kegiatan		- 1 Kegiatan				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Sertifikasi Operator Motor Diesel	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Operator Motor Diesel				- 1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan		- 1 Kegiatan		- 1 Kegiatan				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Sertifikasi Mesin Pita Transport	Terlaksananya Sertifikasi Mesin Pita Transport				- 1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan		- 1 Kegiatan		- 1 Kegiatan				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Sertifikasi Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2/ Bekerja Ketinggian	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2/ Bekerja Ketinggian				- 1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan		- 1 Kegiatan		- 1 Kegiatan				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes				- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan dan Sertifikasi Quality Control Scaffolding	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Quality Control Scaffolding				- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KRJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.	Tersedianya tenaga kerja yang berkompentensi sesuai dengankebutuhan pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. Tersedianya Sumber Daya Pelatihan Yang Optimal Dengan Pengembangan Jejaring Kerja sama		Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	47.63%	47.75%		47.88%		48%		48.13%		48.25%		48.25%			
			Persentase Lulusan BLK Yang Diterima Kerja	80%	85%		86%		87%		88%		89%		89%			
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.			9,288,687,500		10,250,000,000		5,425,000,000		6,250,000,000		8,950,000,000		40,163,687,500		
			Pelatihan dan Sertifikasi Beranah	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Peranah			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	- 1 Kegiatan	200,000,000				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Listrik	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Listrik			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan Akutansi Berbasis Komputer	Terlaksananya Pelatihan Akutansi Berbasis Komputer			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan		- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	-			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes Dokter	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes Dokter			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan		- 1 Kegiatan	- 1 Kegiatan	200,000,000				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan dan Sertifikasi Sistem Informasi	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Sistem			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan		- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Pembangkit Level 1	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Pembangkit Level 1			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan		- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan dan Sertifikasi Auditor SMK3	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Auditor SMK3			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ikat/Rigger	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ikat/Rigger			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan dan Sertifikasi Operator K3 Migas	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Operator K3 Migas			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan dan Sertifikasi Rotating	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Rotating			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan		- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Maintenance & Repair Scaffolding	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Maintenance & Repair Scaffolding			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan		- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Umum	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Umum			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Akutansi Pratama	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Akutansi Pratama			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan dan Sertifikasi Forklift	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Forklift			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas AK3 Migas	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas AK3 Migas			- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan		- 1 Kegiatan	- 1 Kegiatan	-				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KRJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.	Tersedianya tenaga kerja yang berkompentensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.		Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	47.63%	47.75%		47.88%		48%		48.13%		48.25%		48.25%			
	Tersedianya Sumber Daya Pelatihan Yang Optimal Dengan Pengembangan Jejaring Kerja sama		Persentase Luisan BLK Yang Diterima Kerja	80%	85%		86%		87%		88%		89%		89%			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.				9,288,687,500		10,250,000,000		5,425,000,000		6,250,000,000		8,950,000,000		40,163,687,500		
		Pelatihan Listrik Otomasi (Electrical)	Terlaksananya Pelatihan Listrik Otomasi (Electrical)				- 1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	- 1 Kegiatan	100,000,000				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Service Sepeda Motor	Terlaksananya Pelatihan Service Sepeda Motor				- 1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan		- 1 Kegiatan	- 1 Kegiatan	-				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan AC	Terlaksananya Pelatihan AC				- 1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan		- 1 Kegiatan	- 1 Kegiatan	-				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Teknisi dan Sertifikasi Komputer	Terlaksananya Pelatihan Teknisi dan Sertifikasi Komputer				- 1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan		- 1 Kegiatan	- 1 Kegiatan	-				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Jejaring Kerjasama dan Promosi BLK	Terlaksananya jejaring kerjasama dan promosi BLK				-	-			-	-	-				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Pelatihan dalam Rangka Pengembangan Workshop Menjadi Tempat Uji Kompetensi	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Pelatihan				-	-			-	-	-				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Peningkatan Profesionalisme, Upgrading dan Pelatihan Instruktur	Terlaksananya upgrading dan pelatihan instruktur				-	-			-	-	-				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Peningkatan Kerjasama dengan Balai Besar dalam rangka optimalisasi pelatihan	Terlaksananya Peningkatan Kerjasama dengan Balai Besar dalam rangka optimalisasi pelatihan				-	-			-	-	-				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pengembangan modul ajar pelatihan	Terlaksananya pengembangan modul ajar pelatihan.				-	-			-	-	-				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Berbasis model Mobile Training	Terlaksananya pelatihan berbasis model MTU				-	-			-	-	-				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Upgrading Metodologi Pelatihan	Terlaksananya upgrading Metodologi Pelatihan				-	-			-	-	-				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Teknik Manufaktur (Instalasi Pipa)	Terlaksananya Teknik Manufaktur (Instalasi Pipa)				- 1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	105,000,000	1 Kegiatan	105,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Teknik Elektronika	Terlaksananya Pelatihan Teknik Elektronika				-	-			-	-	-				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pelatihan Teknik Otomotif	Terlaksananya Pelatihan Teknik Otomotif				- 1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Diklat dan Sertifikasi Asesor	Terlaksananya Pelatihan Asesor				-	-			-	-	-				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Peningkatan Kelembagaan LPK	Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan LPK				-	-			-	-	-				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KRJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.	Tersedianya tenaga kerja yang berkompentensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.		Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	47.63%	47.75%		47.88%		48%		48.13%		48.25%		48.25%				
			Persentase Lulusan BLK Yang Diterima Kerja	80%	85%		86%		87%		88%		89%		89%				
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.																
			Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman	0	0		0		16 orang		16 orang		16 orang		80 orang				
			Pelatihan Las	Terlaksananya Pelatihan Las		1 Kegiatan	377,725,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000		-			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan Welding Inspector Level 1	Terlaksananya Pelatihan Welding Inspector Level 1				- 1 Kegiatan	200,000,000				-		-			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan Las Dasar	Terlaksananya Pelatihan Las Dasar				- 1 Kegiatan	200,000,000				-	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan Las 3G	Terlaksananya Pelatihan Las 3G				- 1 Kegiatan	200,000,000				-		-			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pelatihan Pembuatan kapal dari bahan fiber	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan kapal dari bahan fiber				-		1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	300,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
	Meningkatnya Mita/ Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bagi Calon tenaga Kerja, Tenaga Kerja			Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	42.63%	42.74%		42.88%		43%		43.13%		43.25%		43.25%			DISNAKERTRANS
Pelatihan Kewirausahaan				Terlaksananya Pelatihan					-	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KRJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Mendorong perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja	Terciptanya Kesempatan Kerja Sektor Pertanian, Industri, jasa Yang layak dan Tercapainya Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri		Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	54%	56%		58%		60%		62%		64%		64%						
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66%	66.30%		66.68%		67.05%		67.43%		67.80%		67.80%						
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7.69%	7.16%		7.02%		6.88%		6.74%		6.60%		6.60%						
				Program Penempatan, Perluasan, Penempatan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.																	
				Pemberdayaan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Produktif/Manufaktur	Terlaksananya pemberdayaan perluasan kerja padat karya produktif/manufaktur					- 1 Kegiatan	500,000,000		1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	
				Pemberdayaan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Infrastruktur	Terlaksananya pemberdayaan perluasan kerja padat karya infrastuktur					- 1 Kegiatan	500,000,000		1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	
				Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja Asing di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja Asing di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau				1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	210,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	
				Bimbingan Teknis Pelayanan Penempatan di Kota/Kab. (Bimtek IPK, Petugar Antar Kerja, Pengantar Kerja).	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelayanan Penempatan di Kota/Kab. (Bimtek IPK, Petugar Antar Kerja, Pengantar Kerja).														DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	
				Sosialisasi UU Ketenagakerjaan Tentang Wajib lapor Perusahaan, Penyelenggaraan AKAD dan pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing.	Terlaksananya Sosialisasi UU Ketenagakerjaan Tentang Wajib lapor Perusahaan, Penyelenggaraan AKAD dan pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing.					- 1 Kegiatan	250,000,000		1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	250,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	
				Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Penempatan di Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Penempatan di Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau										- 1 Kegiatan	150,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	
				Peningkatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia	Terselenggaranya Peningkatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia															DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
				Bimbingan Teknis Pemandu Wira Usaha Baru	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pemandu Wira Usaha Baru					- 1 Kegiatan	100,000,000		1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	116,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	
				Pelatihan Peningkatan SDM (Tenaga kerja Dalam Negeri)	Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan SDM (Tenaga kerja Dalam Negeri)					- 1 Kegiatan	250,000,000		1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	250,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	
				Pemberdayaan Perluasan Kerja Teknologi Tepat Guna	Terselenggaranya Pemberdayaan Perluasan Kerja Teknologi Tepat Guna					- 1 Kegiatan	475,000,000		1 Kegiatan	475,000,000	1 Kegiatan	475,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	
				Pelatihan Kewirausahaan	Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan					- 1 Kegiatan	100,000,000		1 Kegiatan	375,000,000	1 Kegiatan	375,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	
		Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Pendamping	Terselenggaranya Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Pendamping					- 1 Kegiatan	200,000,000		1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KRJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis, Berkeadilan dan Bermartabat	Meningkatnya Kualitas Konsituen Hubungan Industrial, Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	23%	24%		25%		26%		27%		28%		28%			
						1,346,154,000		1,660,000,000		2,464,000,000		2,714,000,000		2,864,000,000		11,048,154,000	DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Koordinasi dan sinkronisasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau.	Terlaksananya kegiatan Dewan Pengupahan Prov. Kepri selama 1 Tahun dengan beberapa rekomendasi Upah Minimum		1 Kegiatan	587,701,000	1 Kegiatan	760,000,000	1 Kegiatan	760,000,000	1 Kegiatan	760,000,000	1 Kegiatan	760,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Peningkatan Peran Lembaga Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan LKS Tripartit Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Peran Lembaga Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan LKS Tripartit Provinsi Kepulauan Riau		1 Kegiatan	329,687,800	1 Kegiatan	400,000,000	1 Kegiatan	400,000,000		0	1 Kegiatan	400,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Advokasi Pelaksanaan dan Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Melalui Struktur dan Skala Upah Di Perusahaan-Perusahaan Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya kegiatan Advokasi Pelaksanaan dan Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Melalui Struktur dan Skala Upah Di Perusahaan-Perusahaan Provinsi Kepulauan Riau		1 Kegiatan	428,765,200	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	450,000,000	1 Kegiatan	450,000,000	1 Kegiatan	450,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Deteksi dini kerawanan hubungan industrial di Provinsi	Terselenggaranya rapat koordinasi tersebut dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dalam penanganan					0	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Bimbingan Teknik negosiasi Penanganan kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Terselenggaranya Bimbingan Teknik Negosiasi Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial					0	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Bimtek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Perusahaan	Terselenggaranya Bimbingan Teknis PKWT dan PKWTT dengan baik sehingga menjadi acuan dalam membuat perjanjian					0			0			0			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Bimtek tatacara beracara di pengadilan hubungan industrial bagi SP/SB	Terselenggaranya Bimbingan Teknis tersebut sehingga menjadi acuan dalam penghitungan upah dan lembur di perusahaan					0			0			0			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Diseminasi sistem jaminan sosial nasional bagi pekerja sektor informal	Terlaksananya sosialisasi perlindungan terhadap norma jamsostek dengan baik					0	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Bimbingan Teknis Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh					0			0			0			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Survey Kebutuhan Hidup Layak di Provinsi Kepri	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan hidup Layak					0			0			0			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KRJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis, Berkeadilan dan Bermartabat	Meningkatnya Kualitas Konsituen Hubungan Industrial, Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha		Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	23%	24%		25%		26%		27%		28%		28%						
		Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				1,346,154,000		1,660,000,000		2,464,000,000		2,714,000,000		2,864,000,000		11,048,154,000		DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau		
		Bimbingan Teknis Tata cara pembentukan LKS Bipartit	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Kelembagaan daan						0	1 Kegiatan	204,000,000	1 Kegiatan	204,000,000	1 Kegiatan	204,000,000				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	
		Pembinaan Kepesertaan Program BPJS	Terbinanya Lembaga Ketenagakerjaan						0	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	
		Bimbingan Teknis Pembentukan LKS Bipartit	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembentukan LKS						0	0		0	1 Kegiatan	200,000,000					DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	
		Sosialisasi Peraturan Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri						0	0		0			0					DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Bimbingan Teknis untuk peningkatan kapasitas SP/SB	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kesejahteraan Pekerja Melalui Koperasi							0		0			0					DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Penyuluhan Tentang Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak dan Pencegahannya	Terlaksananya Penyuluhan Tentang Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak dan Pencegahannya							0		0			0					DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan tentang diskriminasi di tempat kerja	Terlaksananya Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan tentang diskriminasi di tempat kerja							0		0			0					DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Dukungan kegiatan peringatan hari buruh	Terlaksananya Dukungan kegiatan peringatan hari buruh							0	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KRJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan, Menjadi Institusi Andalan, dan Menciptakan Sausana Nyaman dan Produktif	Meningkatnya cakupan tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan		Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	70%	75%		80%		85%		90%		95%		95%					
			Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di Tempat Kerja	1%	1.50%		2%		2.50%		3%		3.50%		3.50%					
			Persentase kasus ketenagakerjaan yang ditangani	65%	70%		75%		80%		85%		90%		90%					
			Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja.																	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program K3 dan BPJS di Perusahaan-Perusahaan Provinsi Kepulauan Riau.	Terselenggaranya Koordinasi dan Monitoring tersebut selama 1 tahun dan tersedianya data program pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan dan jansostek/BPJS				1 Kegiatan	120,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Pemantauan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Pemantauan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		1 Kegiatan	129,045,100												DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan		1 Kegiatan	150,955,550												DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Sosialisasi Penerapan SMK3 Di Perusahaan	Terselenggaranya Sosialisasi Penerapan SMK3 Di Perusahaan		1 Kegiatan	86,011,270												DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Operasional UPTD Pengawasan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun	Terselenggaranya Operasional UPTD Pengawasan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun						1 Tahun	525,000,000	1 Tahun	575,000,000	1 Tahun	600,000,000				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Operasional UPTD Pengawasan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam	Terselenggaranya Operasional UPTD Pengawasan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam						1 Tahun	850,000,000	1 Tahun	900,000,000	1 Tahun	950,000,000				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	
		Operasional UPTD Pengawasan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjungpinang	Terselenggaranya Operasional UPTD Pengawasan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang						1 Tahun 4 Lokasi	1,000,000,000	1 Tahun	525,000,000	1 Tahun	600,000,000				DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KRJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan, Menjadi Instutusi Andalan, dan Menciptakan Sausana Nyaman dan Produktif	Meningkatnya cakupan tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan		Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	70%	75%		80%		85%		90%		95%		95%				
			Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di Tempat Kerja	1%	1.50%		2%		2.50%		3%		3.50%		3.50%				
			Persentase kasus ketenagakerjaan yang ditangani	65%	70%		75%		80%		85%		90%		90%				
			Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja.																
			Rapat Koordinasi Teknis Daerah dan Bedah Kasus Pengawas Ketenagakerjaan.	Terselenggaranya Koordinasi Teknis Daerah dan Bedah Kasus Pengawasan Ketenagakerjaan				-		-								DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Bimtek Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak.	Terlaksananya bimtek perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak				-		-								DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Peningkatan Kapasitas Pnegakan Hukum Ketenagakerjaan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Hukum Ketenagakerjaan				1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	350,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Rapat Koordinasi dan Monitoring Pekerjaan Terburuk Anak	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Monitoring Pekerjaan Terburuk Anak				-		-								DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV / AIDS di Tempat Kerja.	Terselenggaranya Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS di tempat kerja				-		-								DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
			Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Perusahaan.	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Perusahaan				1 Kegiatan	180,000,000					1 Kegiatan	100,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Dukungan pelaksanaan kegiatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (K3)	Terselenggaranya dukungan pelaksanaan kegiatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (K3)				-		1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KRJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
		Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah				1,177,572,875		1,195,000,000		905,000,000		1,250,000,000		1,350,000,000		5,877,572,875	DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Rapat Kerja Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Se-Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Rapat kerja Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Se-Provinsi Kepulauan Riau		1 Kegiatan	220,362,500	1 Kegiatan	270,000,000	1 Kegiatan	320,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	-		DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD		1 Laporan	64,387,500	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	85,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	-		DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Training Of Trainer Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Terlaksananya Training Of Trainer Perencanaan Tenaga Kerja Makro			-	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	-	-		DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah		1 Dokumen	257,344,750				-	1 Dokumen	200,000,000		-	-		DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Penyusunan Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Penyusunan Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau		1 Dokumen	180,434,375	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	150,000,000		-	1 Dokumen	150,000,000	-		DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Supervisi Peningkatan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Terlaksananya Penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan		1 Kegiatan	205,043,750	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	-		DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Elastisitas Keytenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Penyusunan Elastisitas Keytenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau		1 Dokumen	250,000,000		-			1 Dokumen	250,000,000		-	-		DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Analisis Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dokumen Analisis Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau				1 Dokumen	250,000,000					1 Dokumen	200,000,000	-		DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Studi implementasi kebijakan Link and Match di Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dokumen hasil Studi implementasi kebijakan Link and Match di Provinsi Kepulauan Riau					-					1 Dokumen	200,000,000	-		DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Kajian evaluasi kebijakan Mutual Recognition Agreement (MRA) MEA di Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dokumen hasil Kajian evaluasi kebijakan Mutual Recognition Agreement (MRA) MEA di Provinsi Kepulauan Riau					-					1 Dokumen	200,000,000	-		DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Program Penguatan Basis Informasi				39,830,600		150,000,000		256,000,000		350,000,000		375,000,000		1,170,830,600	DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pengelolaan Website Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau	Terpenuhi Kebutuhan Akan Informasi Ketenagakerjaan Secara Online			-	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	181,000,000	1 Kegiatan	225,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	-		DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Kegiatan Survey, Verifikasi dan Monitoring Pada Kegiatan Hubah/Sosial SKPD	Terlaksananya Kegiatan Survey, Verifikasi dan Monitoring Pada Kegiatan Hubah/Sosial SKPD		1 Kegiatan	39,830,600			1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	-		DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Monitoring dan Evaluasi Pasar Kerja	Tersedianya Data informasi Pasar Kerja Di Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau			-		-		-	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	-		DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KRJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				25,000,000	25,000,000	150,000,000		175,000,000		175,000,000		175,000,000		550,000,000	DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Dengan Sistem Pelaporan / LAKIP Diharapkan Dapat Mengetahui Sejahtera Mana Pencapaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017		1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Monitoring dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Se-Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Informasi dan Data-Data Ketenagakerjaan Di Provinsi Kepulauan Riau			-		-	1 Laporan	125,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-		-		200,000,000		200,000,000		200,000,000		600,000,000	DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Baik		1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pengembangan sarana	Tertelaksananya Pengembangan sarana		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dengan Baik		1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-		-		200,000,000		200,000,000		200,000,000		600,000,000	DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Peningkatan Kapasitas Organisasi	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Organisasi		1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000			DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau
		Training dan peningkatan kapasitas dan kualitas mengajar instruktur	Tertelaksananya training dan peningkatan kualitas dan kuantitas mengajar instruktur.		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000		300,000,000	DISNAKERTRANS	Provinsi Kepulauan Riau

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan dikemukakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang ke dalam IKU RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

Adapun indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tabel.7.1.
Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar								
1.	Tenaga kerja								
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	%	7,69	7,16	7,02	6,88	6,74	6,6	6,6
2.	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	54	56	58	60	62	64	64
3.	Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja	%	80	85	86	87	88	89	89
	Urusan Pemerintahan Pilihan								
2.	Transmigrasi								
1.	Jumlah warga (KK) yang ditempatkan sesuai dengan rencana penempatan	KK	1.471	1.471	1.471	1.471	2.730	2.730	2.730

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi Pelaksanaan Program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja).

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (Akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *Clean and Good Governance*.

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian wajib mengarahkan pelaksanaan Rencana Strategis dengan segenap sumber daya yang ada.
2. Unit Pelaksana Teknis/UPT BLK dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau wajib melaksanakan program-program sesuai dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

3. Unit Pelaksana Teknis/UPT BLK dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.
4. Setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dalam Renstra berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis dan Bidang-bidang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *Outcomes* atau minimal *Outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.